

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur. Dengan Visi untuk *“Mewujudkan Kaltim sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka guna mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera”*,

#### **A. Tiga Agenda Utama Pembangunan**

- Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 3 Tahun 2007, berikut

pembagian urusan desentralisasi yang terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Urusan Wajib meliputi :**

1. Urusan Pendidikan.
2. Urusan Kesehatan :
  - a. Dinas Kesehatan.
  - b. RSUD A.Wahab Syahrani.
  - c. RSUD Kanujoso Djatiwibowo.
  - d. RSK Atma Husada.
  - e. RSUD Tarakan.
  - f. Badan Narkotika Provinsi.
3. Urusan Lingkungan Hidup.
4. Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan.
5. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan.
  - b. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan.
6. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
7. Urusan Penanaman Modal.
8. Urusan Wajib Koperasi dan UMKM dan urusan Pilihan Industri, Perdagangan UKM.
9. Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil, Otonomi Daerah dan Pertanahan.
10. Urusan Wajib Ketenagakerjaan & Urusan Pilihan Transmigrasi.
11. Urusan Ketahanan Pangan.
12. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB dan Keluarga Sejahtera.
13. Urusan Perhubungan.
14. Urusan Komunikasi dan Informatika :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - b. Sekretariat KPID.

15. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
- a. Badan Kesatuan Bangsa.
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja.
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Urusan OTDA, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :
- a. Biro Humas dan Protokol.
  - b. Biro Biro Sosial.
  - c. Biro Umum.
  - d. Biro Organisasi.
  - e. Biro Pemerintahan
  - f. Biro Pembangunan Daerah.
  - g. Biro Ekonomi.
  - h. Biro Hukum.
  - i. Biro Perlengkapan.
  - j. Biro Keuangan.
  - k. Biro Kerjasama.
  - l. Sekretariat DPRD Provinsi.
  - m. Dinas Pendapatan Daerah.
  - n. Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
  - o. Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah.
  - p. Inspektorat Provinsi.
  - q. Badan Kepegawaian Daerah.
  - r. Kantor Penghubung Provinsi di Jakarta.
  - s. Sekretariat KORPRI.
17. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
18. Urusan Sosial.
19. Urusan Wajib Kebudayaan dan Pilihan Pariwisata.
20. Urusan Kearsipan.
21. Urusan Perpustakaan.

**Sedangkan urusan pilihan meliputi:**

1. Urusan Kelautan dan Perikanan.
2. Urusan Pertanian :
  - a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Penyuluhan.
  - b. Dinas Perkebunan.
  - c. Dinas Peternakan.
3. Urusan Kehutanan.
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjabarkannya dalam Tiga Agenda Utama Pembangunan yang dituangkan ke dalam 15 Prioritas Pembangunan 2011 sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2011	URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
<b>Agenda 1 : Menciptakan Kaltim Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa</b>	<b>Prioritas 7 :</b> Reformasi Birokrasi/ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik.  <b>Prioritas 8 :</b> Penegakan Hukum, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  <b>Prioritas 15 :</b> Pembangunan Kawasan Perbatasan.	a. Pemerintahan Umum. b. Kepegawaian. c. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. d. Perencanaan Pembangunan. e. Perbatasan. f. Kearsipan. g. Komunikasi dan Informasi. h. Pertanahan. i. Statistik. j. Perpustakaan.

AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2011	URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
<p><b>Agenda 2 : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat</b></p>	<p><b>Prioritas 1</b> Pembenahan Penggunaan Tanah dan Penyelesaian RTRWP.</p> <p><b>Prioritas 2 :</b> Pembangunan Infrastruktur (Trans Kalimantan/Jalan/Jembatan/Free Way/Pelabuhan Udara/Pelabuhan Laut).</p> <p><b>Prioritas 3 :</b> Revitalisasi/Peningkatan Daya Listrik.</p> <p><b>Prioritas 6 :</b> Revitalisasi Pertanian tahap II/ Meningkatkan Produksi dan Ketahanan Pangan/Kecukupan Pupuk.</p> <p><b>Prioritas 9</b> Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat/Kewirausahaan /Pengembangan Sektor Riil/ UMKM melalui pengucuran Kredit Perbankan.</p> <p><b>Prioritas 10</b> Meningkatkan Daya Saing Daerah/Daya Tarik Investasi dan mobilisasi pembiayaan dan investasi di luar APBN dan APBD.</p> <p><b>Prioritas 13</b> Mengantisipasi pemanasan Global &amp; Mitigasi Perubahan Iklim.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertanian Tanaman Pangan.</li> <li>b. Perkebunan.</li> <li>c. Peternakan.</li> <li>d. Ketahanan Pangan.</li> </ol> </li> <li>2. Kelautan dan Perikanan.</li> <li>3. Kehutanan.</li> <li>4. Perindustrian.</li> <li>5. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.</li> <li>6. Penanaman Modal Daerah.</li> <li>7. Perdagangan.</li> <li>8. Pekerjaan Umum.</li> <li>9. Tata Ruang.</li> <li>10. Energi dan Sumberdaya Mineral.</li> <li>11. Perhubungan.</li> <li>12. Lingkungan Hidup.</li> <li>13. Pariwisata.</li> <li>14. Perumahan.</li> <li>15. Kebudayaan.</li> </ol>

AGENDA	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2011	URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
<b>Agenda 3</b> <b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial</b>	<p><b>Prioritas 4</b> Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan.</p> <p><b>Prioritas 5</b> Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.</p> <p><b>Prioritas 11</b> Peningkatan Program Kaltim Cemerlang/Peningkatan Kualitas Pendidikan.</p> <p><b>Prioritas 12</b> Reformasi Pelayanan Kesehatan dalam rangka Kaltim Sehat 2010 yang bermutu, merata, pelayanan gratis bagi masyarakat miskin/tidak mampu dan Revitalisasi Program KB.</p> <p><b>Prioritas 13</b> Memperkuat Jati diri dan karakter bangsa serta peningkatan partisipasi pemuda/wanita dan peningkatan prestasi olah raga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan.</li> <li>2. Kesehatan.</li> <li>3. Pemuda dan Olah Raga.</li> <li>4. Pemberdayaan Perempuan &amp; KB.</li> <li>5. Sosial.</li> <li>6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</li> <li>7. Tenaga Kerja.</li> <li>8. Transmigrasi.</li> </ol>

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Pembangunan Kalimantan Timur dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tiga Agenda Utama Pembangunan yaitu:

**AGENDA PERTAMA, *Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.***

Agenda pertama visi Kalimantan Timur Bangkit 2013 adalah menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pembangunan di Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

Selengkapnya, disampaikan beberapa capaian hasil pembangunan bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pada bulan Maret tahun 2011 telah dilaunching PTSP Provinsi dan diikuti oleh tujuh PTSP Kabupaten/Kota yang telah mendapat Prasasti dan pengakuan dari BKPM Pusat, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, Kutai Barat, Paser, Kota Samarinda, Bontang, Balikpapan, Tarakan, sedangkan yang belum melakukan *launching* adalah Penajam Paser Utara. Dengan adanya PTSP waktu yang diperlukan dalam proses perijinan hanya rata-rata 15-24 hari, lebih pendek dibanding sebelumnya yang memerlukan waktu 2 - 3 bulan dengan dampak terjadinya peningkatan 25% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain waktu pengurusan yang lebih pendek dengan adanya PTSP ini juga lebih

menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya.

2. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, telah melaksanakan perekaman dalam dua tahap. Pada tahap pertama, 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang melaksanakan perekaman data e-KTP, yaitu : Kota Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Nunukan, dan Kab. Malinau. Berdasarkan hasil evaluasi perekaman wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP), diperoleh data diatas 80%. Atas capaian tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 7 Kabupaten/Kota tersebut.
3. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2009 dibentuk pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (*e-procurement*) Kalimantan Timur, yang diikuti oleh kota Bontang dan kota Balikpapan. Paket lelang yang dilaksanakan LPSE provinsi pada Tahun 2009 sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai pagu pengadaan Rp.252 juta dilakukan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kominfo. Pada tahun 2010 sebanyak 22 SKPD Provinsi telah melakukan lelang elektronik dengan jumlah paket sebanyak 105 dengan nilai Rp.237,65 Milyar. Pada tahun 2011 SKPD yang telah melakukan lelang elektronik sebanyak 36 SKPD Provinsi dengan jumlah paket lelang sebanyak 777 dengan nilai Rp.4,3 Trilyun.
4. Tahun 2011 penerapan LPSE di Kalimantan Timur telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 12 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota. Adapun



Kabupaten/Kota yang belum menerapkan Lelang elektronik adalah Kabupaten Tana Tidung dan Malinau.

5. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Timur telah dibentuk pada tahun 2011 dengan Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2011. ULP yang dibentuk, yaitu bidang pekerjaan konstruksi dan konsultansi berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan bidang pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya berkedudukan di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik (Samsat *online*), telah *dilaunching* pada tahun 2009 dan telah berjalan dengan baik di 14 Kabupaten/Kota. Dengan Samsat *online*, pembayaran dapat dilakukan di Kabupaten/Kota domisili mereka walaupun pajak kendaraan mereka terdaftar di Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur serta sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan dari pajak kendaraan (PKB-BBNKB dan PBB-KB) dari Rp.688,52 Milyar pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.1,06 Trilyun atau meningkat 64,77% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.1,43 Trilyun atau meningkat 74,38%.
7. Reformasi Birokrasi Bidang Kepegawaian dititikberatkan pada upaya mereformasi sistem administrasi dan pelayanan kepegawaian agar lebih efisien, efektif dan produktif. Penerapan Kartu PNS Elektronik diresmikan Menpan Tanggal 22 Januari 2009 dan Kalimantan Timur merupakan Provinsi percontohan bersama 4 Provinsi lainnya yaitu DKI, Jatim, NAD dan Kepri. Kalimantan Timur dinilai oleh KEMENPAN-RB menjadi Provinsi terbaik dan telah menerapkan Sistem KPE secara *online*

dengan BKN, yang diikuti oleh Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

8. Reformasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD yang telah dibangun mulai Tahun 2010 mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD 2011 secara *online* kepada seluruh SKPD dan 14 Kabupaten/Kota. Dalam Tahun 2011, telah dilakukan tahapan pengintegrasian SIPPD dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV) serta Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS). Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diaudit dan mendapatkan SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012 bersamaan dengan pembukaan Musrenbang penyusunan RKPD 2013.
9. Untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan Pembangunan, diterapkan SIMONEV yang berbasis *internet* dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan daerah.
10. Pelaksanaan Otonomi Daerah sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan dan penataan kota maupun kabupaten di daerah. Dinamisasi pembangunan ini cukup menuntut adanya transparansi informasi oleh publik terhadap program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, sedang dibangun, maupun yang akan dikembangkan. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi

telah membangun Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS) yang akan dikembangkan ke dalam bentuk sistem informasi berbasis *web GIS*. Sistem ini bekerja untuk mengembangkan *geodatabase* dan menyempurnakan informasi penataan ruang. Selain itu SIMODAS disusun menggunakan *geodatabase* yang sesuai dengan standar Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2007.

11. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Menteri Negara PAN-RB dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan pembentukan Tim Kormonev sebagai pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. Hingga tahun 2011 telah terbentuk tim Kormonev Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota yaitu Kota Samarinda, Tarakan, Balikpapan, Kabupaten Berau, Kutai Timur, Nunukan, Malinau, Bulungan, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Penetapan Kalimantan Timur sebagai *Island of Integrity* juga telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dan hasil survei Integritas Sektor Publik tahun 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kalimantan Timur memperoleh Peringkat ke 4 dari 5 Pemerintah Provinsi dengan Skor Integritas Tertinggi.
12. Penghargaan dari Kementerian PAN berupa Piagam Madya Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai berhasil menciptakan inovasi perbaikan pelayanan diterima oleh Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur. Ada beberapa inovasi pelayanan yang dikembangkan sejak Tahun 2009, yaitu :

- 1) Peningkatan layanan perpustakaan secara online dan terintegrasi dengan 13 perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan SKPD maupun Perpustakaan Kabupaten/Kota.
  - 2) Peningkatan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan (mobil perpustakaan keliling) dengan 14 lokasi pelayanan di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan PPU.
  - 3) Pemberian bantuan buku kepada beberapa perpustakaan desa maupun perpustakaan Puskesmas. Peningkatan Layanan perpustakaan secara online maupun perpustakaan keliling secara nyata dapat meningkatkan jumlah pengunjung dari 126.342 orang pada tahun 2008, 171.144 orang pengunjung pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 35,46% menjadi 186.231 orang pengunjung tahun 2010 atau meningkat sebesar 8,81% dan tahun 2011 jumlah pengunjung meningkat sebesar 78,42% atau 237.473 orang.
13. Dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan, pedalaman dan perbatasan serta daerah yang tidak memiliki akses informasi, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupa M-LIK yaitu mobil pelayanan internet sebanyak 72 unit yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Mobil ini juga dapat digunakan sebagai perpustakaan elektronik bergerak, dengan jaringan internet yang

ada referensi buku-buku akan mudah didapat masyarakat di pedesaan, pedalaman dan perbatasan dengan mudah dan murah.

14. Dalam Bidang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2009, berdasarkan laporan POLDA Kalimantan Timur tercatat jumlah kriminalitas 9.115 perkara pada tahun 2010 naik menjadi 9.955 perkara dan pada tahun 2011 turun menjadi 9.238 perkara. Kasus pencurian ikan juga menurun tajam, pada tahun 2009 sebanyak 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita 5 buah dan tahun 2010 menjadi 1 kasus dengan jumlah kapal yang disita 1 buah. Pada tahun 2011 meningkat 10 kasus dengan jumlah kapal yang disita 11 unit. Sementara pencurian dan penyelundupan kayu, walaupun dari jumlah kasus tahun 2009 sebanyak 328 kasus, menurun menjadi 296 kasus pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 turun menjadi 251 kasus.

Kegiatan unjuk rasa masyarakat di Bidang Politik pada tahun 2009 sebanyak 65 kasus, 2010 meningkat 258 kasus, 2011 turun tajam menjadi 17 kasus. Di Bidang Ekonomi tahun 2009 sebanyak 99 kasus, 2010 turun menjadi 60 kasus, 2011 naik menjadi 134 kasus. Pemogokan tenaga kerja tahun 2009 sebanyak 253 kasus, 2010 turun menjadi 14 kasus, 2011 kembali menurun menjadi 12 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa peningkatan stabilitas ketertiban umum di daerah cukup terkendali.

15. Dalam Bidang Hukum dan Demokrasi, terjadi kemajuan yang cukup signifikan dari masyarakat Kalimantan Timur dimana nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur tahun 2009 sebesar 71,52% dan menempati ranking ke-6 dari 33 provinsi se Indonesia. Apabila dibandingkan dengan indeks demokrasi tahun 2008 sebesar 51,01% atau menempati urutan ke-30 dari 33

Provinsi. Kesadaran berdemokrasi masyarakat juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten, Kutai Kartanegara bulan Mei 2010 tingkat partisipasi pemilih 283.234 pemilih atau 65,61%, Kabupaten Paser bulan Juni 2010 sebanyak 103.419 pemilih atau 66,75%, Kabupaten Bulungan bulan Juni 2010 sebanyak 54.296 pemilih atau 73,15%, Kabupaten Berau bulan Juli 2010 sebanyak 82.021 pemilih atau 66,33%, Kota Samarinda bulan Oktober 2010 sebanyak 313.539 pemilih atau 61,59%, Kabupaten Kutai Timur bulan November 2010 sebanyak 118.272 pemilih atau 56,39%, dan Kota Bontang bulan Desember 2010 sebanyak 73.302 pemilih atau 65,55%. Pada tahun 2011 partisipasi masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Malinau bulan Januari 2011 sebanyak 34.551 pemilih atau 70,11%, Kabupaten Kutai Barat bulan Januari 2011 sebanyak 90.143 pemilih atau 73,61%, Kota Balikpapan bulan Pebruari 2011 sebanyak 226.801 pemilih atau 56,31%, Kabupaten Nunukan bulan Pebruari 2011 sebanyak 74.023 pemilih atau 75,22%. Partisipasi pemilih dalam Pemilukada di Kalimantan Timur pada tahun 2010 dan tahun 2011 rangking tertinggi adalah Kabupaten Nunukan dengan tingkat partisipasi masyarakat 74.023 pemilih atau 75,22%.

16. Pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan informasi peluang kerja dilaksanakan melalui bursa kerja secara *online* dan *Job Market Fair* (JMF). Upaya ini dilakukan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Pada Tahun 2009 difasilitasi 67 perusahaan dengan 1.100 pencari kerja untuk 576 lowongan kerja dan diterima sebanyak 402 pekerja. JMF pada tahun 2010 dengan

68 perusahaan 1.744 pencari kerja dengan jumlah lowongan 548 yang diterima sebanyak 261 pekerja. JMF pada tahun 2011 dengan 114 perusahaan, 3.226 pencari kerja dengan jumlah lowongan 614, diterima sebanyak 1.655 pekerja.

17. Pembangunan stasiun Produksi RRI di Kabupaten Perbatasan yaitu Malinau, Nunukan dan Kutai Barat. Untuk kabupaten Malinau sudah *On Air* sejak tanggal 21 Juli 2010 dan Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2011.
18. Untuk mempercepat Pembangunan Wilayah Perbatasan telah dilakukan yaitu :
  - a. Peningkatan Struktur Jalan pada Ruas Jalan Tanjung Selor – Sekatak Buji – Malinau – Mensalong – Simanggaris – Serudong (Batas Negara) – Sei Ular sepanjang 424,16 Km, pada tahun 2011 dengan kondisi aspal sepanjang 316,68 Km, agregat sepanjang 107,48 Km. Penanganan Longsor pada ruas ini sepanjang 60 meter serta pembangunan 3 buah jembatan sepanjang 100 meter. Pada tahun 2012 sedang dilaksanakan peningkatan struktur jalan aspal sepanjang 15,20 Km.
  - b. Peningkatan Struktur Jalan lingkaran Pulau Sebatik sepanjang 77,9 Km, pada tahun 2011 dengan kondisi aspal sepanjang 50,90 Km, agregat sepanjang 10,30 Km dan tanah sepanjang 16,70 Km. Pada tahun anggaran 2012 sedang dilaksanakan peningkatan struktur jalan aspal sepanjang 18,30 Km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 3 Km.
  - c. Jalan Malinau – Long Bawan sepanjang 180 Km, telah terbangun 82,60 Km, dengan kondisi aspal sepanjang 12,10 Km, agregat 70,5 Km dan belum terbangun 97,4 Km, pada

tahun anggaran 2012 dilaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan sepanjang 40 Km dan kegiatan tambahan pembukaan badan jalan bersumber dana SAL sepanjang 11,06 Km.

- d. Jalan Malinau – Long Alango sepanjang 212,20 Km, telah terbangun 163,14 Km dengan kondisi agregat 15 Km, tanah 148,14 Km dan belum terbangun 49,06 Km, pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan pembukaan badan jalan sepanjang 7 Km.
- e. Jalan Batas Negara – Long Nawang – Long Apung – Sungai Barang – Mahak Baru sepanjang 68,50 Km, dengan kondisi agregat 15,5 Km dan tanah sepanjang 53 Km. Tahun 2012 dilaksanakan peningkatan struktur tanah menjadi agregat sepanjang 14,6 Km.
- f. Jalan Mahak Baru – Sei Barang telah dilaksanakan pembukaan badan jalan sampai dengan tahun 2011 sepanjang 40,5 Km dengan kondisi tanah dan tahun 2012 dilaksanakan kegiatan peningkatan dari permukaan tanah menjadi agregat sepanjang 20 Km.
- g. Jalan Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari – Batas Kalimantan Barat sepanjang 225 Km, dengan kondisi tanah sepanjang 35 Km, sisanya sepanjang 190 Km belum terbuka. Tahun 2012 dilaksanakan peningkatan dari tanah ke agregat sepanjang 9 Km serta pembangunan jembatan di Sungai Tebunut (Long Bagun) sepanjang 60 meter.
- h. Ruas Jalan Long Midang – Batas Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk Jalan Pararel perbatasan dari Batas Kalbar – Tiong Ohang – Long



Pahangai – Long Nawang – Long Pujungan – Long Kemuat – Langap – Malinau. Ruas Jalan Mensalong – Tau Lumbis. Ruas Jalan Malinau – Long Bawan. Akan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan sumber dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).

- i. Pengembangan Bandara di Kawasan Perbatasan yaitu Nunukan, Long Bawan, Long Ampung dan Data Dawai akan dikembangkan landasan pacu menjadi 1.600 meter secara bertahap dengan tingkat pencapaian sekitar 20% - 30%. Ketiga bandara tersebut telah dianggarkan dengan total dana Rp.500 Milyar dengan *Multi Years Contract*. Tahun 2013 ditargetkan selesai dan dapat didarati *Hercules*. Selain itu telah diselesaikan terminal penumpang bandara Malinau dan Nunukan yang representatif.
- j. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan kegiatan percepatan penataan batas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi pelacakan batas daerah serta melakukan Pilar Batas Utama (PBU) guna menghindari konflik di lapangan. Pada tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pelacakan tapal batas antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi sepanjang 1.309 Km dan pemasangan PBU sebanyak 156 buah yang terdiri antar provinsi 26 buah dan Kabupaten/Kota 130 buah. Pada tahun 2011 sudah terpasang PBU sebanyak 48 buah yang terdiri 10 buah antar provinsi dan 38 antar Kabupaten/Kota.
- k. Untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah perbatasan, Pemerintah Provinsi pada tahun 2011 telah memberikan

beasiswa khusus untuk 3 Kabupaten di kawasan perbatasan, masing-masing sebesar Rp.1 Milyar melalui bantuan keuangan.

1. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jauh dari akses pelayanan rumah sakit terutama masyarakat di daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membantu upaya peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam sebanyak 83 Puskesmas tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 15 diantaranya berada di wilayah perbatasan.

### **AGENDA KEDUA, *Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang berdaya Saing dan Pro Rakyat.***

Perekonomian Kalimantan Timur tahun 2009 yang tergambar melalui besaran PDRB atas harga berlaku dengan migas mencapai Rp.285,59 Trilyun, pada tahun 2010 PDRB Kalimantan Timur mencapai Rp.321,9 Trilyun. Sedangkan pada tahun 2011 telah berada pada angka Rp.390,64 Trilyun.

Indikator makro lainnya seperti inflasi tahun 2011 sebesar 6,35% lebih rendah dari akhir tahun 2010 sebesar 7,28%. Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 0,2025%.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, Pemerintah Provinsi berupaya untuk merubah struktur ekonomi yang bersumber dari Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui ke yang dapat diperbaharui dengan

mengembangkan beberapa kawasan andalan/industri untuk dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Upaya tersebut telah menampakkan hasilnya, dengan ditetapkannya Kalimantan Timur bersama Provinsi Riau dan Sumatera Utara berdasarkan Inpres Nomor I tahun 2010 sebagai *Cluster* Industri berbasis Pertanian, *Oleochemical* di Kawasan Malay Kutai Timur dan bersama Provinsi Jawa Timur sebagai *Cluster* Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang.

Disamping itu, di Kota Balikpapan telah dikembangkan Kawasan Industri Kariangau. Ketiga kawasan industri tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan memberikan harapan dan peluang kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan.

Pengembangan *cluster* industri tersebut mutlak perlu didukung dengan infrastruktur yang handal. Penetapan jalan lintas Kalimantan sebagai salah satu Koridor Ekonomi Nasional. Ditetapkannya rencana pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 567/KPTS/M/2010 menjadi bukti dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan *cluster* tersebut.

Pengembangan *cluster* industri telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 26 Tahun 2008) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur. Untuk RTRWP Kalimantan Timur walaupun belum ditetapkan, namun kini menunggu Persetujuan Pembahasan DPR RI, yaitu tahap 12 dari 13 tahapan pembahasan perubahan kawasan hutan. Setelah melakukan pembahasan di DPR RI, RTRW Provinsi Kalimantan Timur masuk pada tahapan akhir, yaitu persetujuan atau penetapan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan oleh Menteri Kehutanan.

Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 yakni 4,366 Trilyun meningkat 61,05% dari tahun 2010 yang hanya sebesar 2,711 Trilyun. Untuk dana perimbangan pada tahun 2011 yakni 5,293 Trilyun naik 22,87% dari tahun 2010 sebesar 4,308 Trilyun.

Capaian pembangunan di Kalimantan Timur di bidang daya saing ekonomi daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, di Bidang Infrastruktur, antara lain:

1. Kondisi mantap jalan nasional mencapai 72,84% di tahun 2011 naik bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 72,04%, hal ini dipengaruhi oleh perubahan skala prioritas dari program pemeliharaan ke penanganan jalan yang mengalami kritis/mendesak. Perkembangan jenis permukaan aspal dari tahun 2009 sepanjang 1.289,08 Km atau 83,72% dan tahun 2010 sepanjang 1.760,10 Km atau 83,09% sedangkan tahun 2011 sepanjang 1.816,52 Km atau 85,76%.
2. Adapun beberapa ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan yaitu Batu Aji-Kuaro-Penajam, Kerang pada batas

Prov. Kalsel-batas Kota Tanah Grogot, Muara Lembak-Pelabuhan Sangkulirang, Simpang Perdau - Batu Ampar – Muara Wahau – Kelay – Labanan, Tj. Palas – Malinau, Mensalong – Simanggaris – Batas Negara dan Simpang Blusuh – Batas Kalteng. Untuk menangani kerusakan ruas jalan tersebut, tahun 2012 telah dialokasikan dana melalui APBN sebesar Rp.682,799 Milyar untuk Poros Selatan, Rp.50 Milyar untuk Poros Selatan dan Rp.244,244 Milyar untuk jalan perbatasan.

3. Kondisi mantap Jalan Provinsi mencapai 65,69% di tahun 2011 meningkat bila dibandingkan tahun 2009 sebesar 62,46% dan tahun 2010 sebesar 63,57%. Pada tahun 2011 jenis permukaan aspal dengan panjang 1.148,09 Km atau 65,16% meningkat bila dibandingkan tahun 2009 dengan panjang 1.097,37 Km atau 62,28% dan tahun 2010 dengan panjang 1.118,47 Km atau 63,47%.
4. Adapun beberapa ruas jalan Provinsi yang mengalami kerusakan yaitu Petung – Semoi – Sepaku – Km. 38 Samboja, Samarinda – Sanga-Sanga – Dondang, Simpang Lembuswana – Sebulu – Muara Bengkal, Simpang Bentuas – Muara Jawa, Kerang – Segendang – Tj. Aru, Linggang Bigung – Batas Kalteng, Sangkulirang – Talisayan, Tanjung Redeb – Tanjung Selor, Tanjung Redeb – Talisayan.
5. Pembangunan Jembatan Pulau Balang merupakan bagian jalan lintas Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, untuk bentang pendek sepanjang 470 m, *progress* telah mencapai 50,09% hingga akhir 2011.

6. Pembangunan Jembatan Mahkota II mencapai 65%. Dukungan Pemerintah Pusat terhambat karena belum adanya akses jalan pendekat di sisi Sungai Kapih serta belum dipindahkannya Terminal Penumpang ke Palaran.
7. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, dengan panjang 99,20 Km dan merupakan yang terpanjang di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi jasa distribusi untuk memperlancar arus barang dan jasa. Program pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda merupakan program nasional dan masuk dalam *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025. Pada tahun 2011 telah dituntaskan pembangunan jalan akses dari Km 13 Balikpapan-jalan tol sepanjang 400 meter dengan pelaksanaan pembangunan jalan tol yang dibagi 5 *segmen* yaitu : *segmen I* Km. 13 Balikpapan – Samboja, *segmen II* Samboja – Palaran I, *segmen III* Samboja Palaran II, *segmen IV* Palaran – Jembatan Mahkota II, *segmen V* Km 13 – Sepinggian Balikpapan dengan progres 8,32 %.
8. Pembangunan Jalan Akses Maloy sepanjang 12 Km yang dimulai pada tahun 2011 dengan target pembukaan badan jalan sepanjang 12 Km dengan lebar badan jalan 14 meter. Pada tahun 2012 melalui alokasi dan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rencana P-APBN sebesar Rp.258 Milyar dengan produk jalan konstruksi *Rigid Pavement* atau Pengerasan Kaku.

9. Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau dengan alokasi dana sebesar Rp.713 Milyar bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan PT. Pelindo IV, sampai saat ini *progress* pembangunan sisi darat terdiri dari Lapangan Penumpukan/*Container Yard* dan bangunan perkantoran mencapai 48%. Untuk sisi laut terdiri dari dermaga, *trestle* dan *Portainer/Grantry Crane* telah mencapai 80%. Untuk mendukung terminal peti kemas tersebut telah dibangun jalan akses dari Km 13 – TPK Kariangau sepanjang 13,5 Km dengan 2 jalur 4 lajur, dimana saat ini permukaan jalan dengan konstruksi *rigid pavement* baru terbangun 11 Km dengan 1 jalur dan 1 buah jembatan dengan *progress* mencapai 62,00%.
10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan dilaksanakan melalui pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan dan pengadaan pagar pengaman pada ruas jalan provinsi. Sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan pemasangan marka jalan sepanjang 218.978 meter, pemasangan pagar pengaman sepanjang 6.093 meter, pemasangan rambu jalan 10.815 buah, pemasangan paku jalan 1.789 buah.
11. Pada tahun 2009 dan 2010 telah disusun rencana induk atau *Master Plan* dan perencanaan teknis sisi laut serta dokumen AMDAL sudah disusun, pada saat ini masih dalam persetujuan Komisi AMDAL Pusat. Pada tahun 2012 akan dilakukan pembangunan fasilitas perkantoran secara bertahap. Sedangkan untuk perencanaan kawasan industri telah disusun studi kelayakan, *Master Plan* dan *business plan* serta AMDAL dan tahun 2012 sedang disusun DED Kawasan Industri Maloy.

12. Pembangunan Pelabuhan Tana Kuning sampai dengan tahun 2011 telah disusun dokumen SID, *Master Plan*, DED dan AMDAL (khusus dokumen AMDAL menunggu proses persetujuan dari Komisi AMDAL Provinsi), sehingga diharapkan nantinya dapat dibangun melalui dana APBN.
13. Pengembangan Bandara Sepinggian Balikpapan oleh PT. Angkasa Pura sesuai dengan *Master Plan*, telah dilaksanakan dengan capaian 28,88% meliputi pembangunan gedung terminal penumpang menjadi 110.000 m<sup>2</sup> dengan Garbarata 10 Unit, relokasi bangunan penunjang, pembangunan gedung parkir dan *apron* serta infrastruktur lainnya. Sedangkan perpanjangan landasan pacu menjadi 3.500 m belum dialokasikan dana pembangunannya melalui APBN.
14. Pembangunan Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung Samarinda dibangun melalui program *Multiyears Contract* 2011-2013 sebesar Rp.696 Milyar untuk sisi darat, sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan *progress* capaian saat ini 6,1%. Sedangkan sisi udara tetap diupayakan untuk mendapatkan alokasi dana melalui APBN.
15. Pengembangan Bandara Kalimarau Berau telah dilaksanakan melalui perpanjangan landasan pacu dari 1.850 meter menjadi 2.250 meter sehingga dapat didarati oleh pesawat *Boeing 737-300* dan *Airbus A-319* dan juga dibangun Terminal Penumpang Baru seluas 9.000 m<sup>2</sup> dilengkapi Garbarata 2 unit. Untuk meningkatkan layanan dan optimalisasi pemanfaatan landasan pacu dan peningkatan keselamatan penerbangan, tahun 2011 dilaksanakan pemotongan bukit di ujung landasan.



16. Pengembangan Bandara Udara Juwata Tarakan dilakukan pembangunan *apron* dengan konstruksi sarang laba-laba, Terminal Penumpang dilengkapi Garbarata 4 unit secara bertahap dan pembangunan landasan pacu baru tahap I berupa pematangan lahan. Saat ini telah dapat didarati pesawat *Boeing 737-900ER* dan *Airbus 320*. Tahun 2011 luas *apron* yang dibangun 3.395 m<sup>2</sup>, sehingga total *apron* yang telah dibangun 33.659 m<sup>2</sup>.
17. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, sedang dibangun prasarana sumber daya air meliputi; pembangunan Bendung dan Embung untuk penyediaan air baku Pulau Sebatik, Nunukan dan Tarakan, pembangunan Bendungan Marangkayu dan Muara Bangun, serta telah dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi 23.278 meter. Kapasitas pembangunan bendung ini 12 juta m<sup>2</sup> dengan *output* 250 liter/detik.
18. Pengembangan bandara perbatasan pada tahun 2011 dialokasikan dana untuk perpanjangan dan pelebaran *run way* antara lain: Bandara Long Bawan dari 1.200 x 23 meter menjadi 1.200 x 30 meter dan pemotongan bukit, Long Ampung dari 840 x 23 meter menjadi 940 x 30 meter dan Data Dawai dari 750 x 23 meter menjadi 850 x 23 meter.
19. Pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau dalam rangka mendukung pariwisata dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan pematangan lahan untuk pembangunan landas pacu sepanjang 100 x 1.700 meter, pembangunan bandara ini juga merupakan

salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi untuk membangun kawasan perbatasan/pulau terluar.

20. Pembangunan sarana dan prasarana sungai dan danau sampai dengan tahun 2011 meliputi pembangunan Dermaga Melak yaitu konstruksi lahan parkir, ruang tunggu, ruang tamu dan gapura, sedangkan gedung kantor, *trestle*, fasilitas bongkar muat, ponton dan *stabilizer* dibangun melalui dana APBN. Pembangunan dermaga Muara Pahu yaitu konstruksi ruang tunggu terminal, bangunan bongkar muat, tower, sedangkan bangunan gedung kantor, *trestle*, ponton dan *stabilizer* dibangun dengan dana APBN.
21. Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air tahun 2011 melalui program antara lain; 1) Pembangunan *Reservoir* yaitu Bendungan Marangkayu, 2) Normalisasi *saluran* yaitu Daerah Rawa Tanjung buka SP. 5-6, 3) Optimalisasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Biatan dan Bendungan Kaliorang, 4) Penyediaan Air Baku yaitu pembangunan Bendungan Lombok, Embung Muru, Bendungan Situ, 5) Pengendalian Banjir yaitu kanalisasi Jalan M. Noor/*Drainase*, penurapan tebing sungai Karang Mumus, normalisasi sungai Sempaja, Bendali Suryanata, 6) Pengamanan Pantai yaitu Pulau Sambit dan Pantai Seloloan.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pertanian, antara lain :

1. Luas kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur tahun 2008 sebesar 409.564 hektar dan tahun 2009 meningkat menjadi 530.554 hektar. Kemudian tahun 2010 sebesar 663.533 hektar,

tahun 2011 menjadi 827.347 hektar atau naik 22,69%. Sementara produksi sawit dalam tahun 2008 sebanyak 1,6 juta Ton, tahun 2009 menjadi 2,3 juta Ton atau naik 38,08% dan tahun 2010 produksi sebesar 3,05 juta Ton, tahun 2011 produksi menjadi 4,47 juta Ton atau naik 46,56%.

2. Produksi CPO setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2008 sebesar 366.148 Ton, tahun 2009 meningkat menjadi 505.610 Ton. Demikian pula tahun 2010 meningkat menjadi 672.035 Ton dan tahun 2011 menjadi 975.112 Ton.
3. Pada tahun 2009 terdapat luas panen padi 146.177 ha dengan produksi 555.561 Ton GKG, tahun 2010 terdapat luas panen padi 150.031 ha, dengan produksi 588.877 Ton GKG setara 338.675 Ton beras. Sedangkan tahun 2011 luas panen padi seluas 140.215 Ha dengan produksi sebesar 552.616 Ton GKG. Produktivitas padi pada tahun 2009 sebesar 38,01 ku/ha dan tahun 2010 sebesar 39,25 ku/ha. Produktivitas padi tahun 2011 sebesar 39,41 ku/ha. Bila dibandingkan kebutuhan beras Kalimantan Timur tahun 2010 sebesar 401.216 Ton, maka masih kekurangan 32.044 Ton beras. Tahun 2011 kebutuhan beras Kalimantan Timur yang dapat dipenuhi secara mandiri baru mencapai 83,43%. Untuk mencapai swasembada beras tersebut, perlu dilakukan perluasan areal baru dan intensifikasi pertanian.
4. Situasi Ketersediaan Pangan ditunjukan oleh ketersediaan energi, protein dan lemak. Tingkat ketersediaan energi tahun 2008 sebesar 2.470 kilokalori per kapita, tahun 2009 sebesar 2.478 kilokalori per kapita dan tahun 2010 sebesar 2.482 kilokalori dengan pertumbuhan 0,24%. Dan Tingkat

ketersediaan protein perkapita tahun 2008 sebesar 70,55 Gram, tahun 2009 sebesar 71,02 Gram dan tahun 2010 sebesar 72,00 Gram dengan pertumbuhan 1,02%, sedangkan tingkat ketersediaan lemak perkapita tahun 2008 sebesar 46,97 Gram, tahun 2009 sebesar 51,29 Gram dan tahun 2010 sebesar 61,12 Gram dengan pertumbuhan 14,07%. Tingkat ketersediaan energi, protein dan lemak tersebut bila dibandingkan dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke VIII tahun 2004, maka tingkat ketersediaan energi, protein dan lemak sudah menunjukkan angka surplus. Namun demikian, tingkat ketersediaan tersebut masih didominasi oleh kelompok bahan makanan yang bersumber dari padi/beras, dimana tahun 2010 tingkat ketersediaan beras mencapai 126,30 Kg perkapita atau 346,04 Gram perkapita per hari.

5. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras yang ditargetkan 1,5% per kapita pertahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI Tahun 2010, maka telah dikeluarkan instruksi Gubernur dan telah pula diikuti instruksi beberapa Bupati/Walikota, telah digalakkan Percepatan Gerakan Penganekaragaman Pangan yang dimulai dari sosialisasi di Sekolah Dasar/MI melalui pemberian KIT pada 70 SD/MI, 110 Kelompok Wanita Tani di pedesaan, hotel, lembaga masyarakat dan PKK melalui Gerakan Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal Non Beras dan Tepung. Gerakan ini mulai menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 86,03% pada tahun 2008 menjadi 89,86% pada 2010 atau

dengan pertumbuhan 2,2% per tahun. Ini sebagai indikator bahwa secara individu masyarakat daerah ini mulai meningkatkan kualitas jenis pangan yang dikonsumsi, yang otomatis bisa mengurangi konsumsi terhadap beras. Namun tidak bisa dipungkiri secara makro kebutuhan beras terus meningkat karena naiknya jumlah penduduk terutama oleh migrasi dari luar Kalimantan Timur baik yang menetap maupun yang tinggal sementara.

6. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan sampai tahun 2010 meliputi 31 Desa, pembangunan Lumbung Pangan di 11 Unit, Pemberdayaan dan Intervensi Daerah Rawan, serta untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 52 kelompok serta dalam tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Keberadaan lembaga ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. Namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi di Kalimantan Timur.
7. Dalam upaya pelaksanaan program strategis pembangunan pertanian terutama di pedesaan, diperlukan penyuluh pertanian

yang cukup, handal dan berkualitas agar petani menjadi produktif, mandiri, dan berkemampuan manajerial dalam mengembangkan usaha tani. Jumlah penyuluh PNS tahun 2008 sebanyak 558 orang, tahun 2009 sebanyak 635 orang dan tahun 2010 sebanyak 853 orang. Kondisi ini tidak sebanding dengan kondisi wilayah Kalimantan Timur saat ini, semestinya di setiap desa memiliki satu orang petugas penyuluh. Untuk itu diperlukan penyuluh tambahan yaitu THL TB-PP yang tahun 2011 sebanyak 393 orang. Untuk mengapresiasi para penyuluh dan kelompok tani tersebut, Pemerintah telah memberikan Perhargaan kepada Penyuluh Berprestasi dari Kab. Berau dan Kelompok Tani Berprestasi dari Kota Balikpapan pada acara HUT Kemerdekaan RI tahun 2011.

8. Dalam upaya untuk mewujudkan swasembada beras, telah dilakukan pencetakan sawah baru pada tahun 2008 seluas 2.023 Hektar, tahun 2009 seluas 800 Hektar, tahun 2010 seluas 800 Hektar dan tahun 2011 telah dicetak sawah seluas 3.250 ha bersumber dari data APBN dan APBD.
9. Upaya pencetakan sawah baru sekitar 3.250 Hektar di tahun 2011 baik bersumber dari dana APBD maupun APBN tersebut, diharapkan dapat mengimbangi pertanian fungsional menjadi lahan non pertanian sekitar 2.605 Ha per tahun. Melihat tingginya alih fungsi lahan tersebut diperlukan penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, yang melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Saat ini telah disusun Raperda, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

10. Dalam upaya membangun kemandirian pangan dalam mengantisipasi melonjaknya harga beras dan pemanasan global, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan membangun *Food Estate* di *Delta Kayan* Bulungan yang memiliki potensi area seluas 50.000 Ha. Pada tahun 2010 ini telah selesai dibuat *Master Plan* oleh Pemkab Bulungan dan telah menarik minat PT. Sang Hyang Sri untuk berinvestasi yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Dirut PT. SHS dengan Bupati Bulungan, disaksikan Gubernur pada tanggal 27 September 2010. Lokasi *Rice/Food Estate* di Kalimantan Timur ada beberapa perusahaan menanamkan investasinya di bidang pertanian diantaranya PT. Sang Hyang Sri (SHS) dan PT. Miwon di Bulungan, PT. Tiga Pilar Group di PPU dan Paser. Telah dilakukan penanaman perdana sekaligus peresmian *Delta Kayan Food Estate* oleh Menteri Pertanian RI tanggal 26 September 2011.
11. Pengadaan prasarana pertanian berupa *Hand Traktor* 20 unit, pompa air 1 unit, pintu air 5 unit, sub terminal agri bisnis 2 unit dan alat penepung ubi kayu dan ubi jalar masing-masing 1 unit.
12. Dalam tahun 2011 telah dilakukan sertifikasi lahan usaha tani di 9 Kabupaten/Kota, pemberian bantuan alat mesin pertanian (*Hand Traktor* 32 unit, *Cultivator* 5 unit, Pompa Air dan kelengkapannya 20 unit, pH meter 3 unit, Pestisida 495 liter dan 400 Kg, Pupuk *Urea* 15 Ton, NPK Mutiara 5,75 Ton), pembangunan jalan usaha tani dan dermaga mendukung *food estate* di Kab. Bulungan.
13. Sub sektor peternakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari sebanyak 93.880 ekor sapi pada tahun 2010, kemudian

berkembang menjadi 99.979 ekor pada tahun 2011 atau naik sebesar 6,1%. Populasi kerbau tahun 2010 sebanyak 9.895 ekor dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 10.008 ekor atau naik 1,12%. Sedangkan ternak unggas meningkat rata-rata sebesar 23,32% atau berkembang dari 31,3 juta ekor pada tahun 2008 menjadi 43,2 juta ekor pada tahun 2010 dan 45,9 Juta ekor pada tahun 2011. Khusus untuk ayam *broiler* (ayam potong) komoditi ini dicapai karena peningkatan produksi DOC (*Day Old Chick*) yang berasal dari tiga *breeding farm* yang ada di Kalimantan Timur yaitu PT. Istana Satwa Borneo, PT. Super Unggas Jaya dan Multi Breder Adhirama yang memproduksi sebesar 40 juta ekor per tahun. Produksi DOC tersebut juga memasok ke wilayah lain di luar Kalimantan Timur seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk konsumsi daging meningkat dari 49.093 Ton pada tahun 2010 menjadi 49.534 Ton di tahun 2011. Pada tahun 2009, konsumsi daging sebesar 46.927 Ton dan tahun 2008 sebesar 36.212 Ton. Konsumsi telur pada tahun 2008 sebesar 15.376 Ton, tahun 2009 sebesar 15.744,43 Ton, meningkat menjadi 18.974 Ton pada tahun 2010. Sedangkan untuk tahun 2011 konsumsi telur sebesar 18.544 sehingga terjadi kenaikan rata-rata sebesar 9.13 Ton. Produksi daging pada tahun 2008 sebesar 35.253,49 Ton, tahun 2009 sebesar 45.725,17 Ton, 47.473 Ton pada tahun 2010 dan sebesar 48.962,26 Ton pada tahun 2011 atau naik rata-rata sebesar 10,81%. Demikian pula halnya dengan produksi telur pada tahun 2008 sebesar 10.521,2 Ton, tahun 2009 sebesar 11.165,29 Ton, meningkat menjadi 14.850,6 Ton pada tahun



2010 dan sebesar 14.882,17 Ton pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 0,22%.

14. Dalam pengembangan ternak di Kabupaten/Kota pada tahun 2010 diberikan bantuan sapi sebanyak 1.150 ekor dan kerbau 44 ekor terdiri dari sapi penggemukan 210 ekor, sapi bibit 752 ekor, sapi betina produktif 88 ekor, sapi PO 100 ekor. Angka ini meningkat dibandingkan dengan kegiatan pada tahun 2008 yang capaian penyalurannya 330 ekor sapi bibit dan kambing untuk kawasan perbatasan, Berau dan Bulungan. Disamping itu juga dalam rangka menunjang agribisnis peternakan telah disalurkan 223 ekor sapi untuk 14 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 telah diberikan bantuan sapi ke 14 Kabupaten/Kota sebanyak 1.219 Sapi Bali, 100 ekor Sapi BC (*Brahman Cross*), 62 ekor Kerbau dan 175 ekor Babi.
15. Kegiatan lainnya yang dilakukan pada tahun 2010 adalah pembangunan Puskesmas 2 unit di Kabupaten Paser dan Kutai Barat, pembuatan kios daging 12 unit di Kabupaten Berau, pengadaan peralatan RPU 4 unit di Kabupaten Nunukan, Balikpapan, Samarinda dan Paser. Pada tahun 2011 dibangun RPU di Berau dan Penajam Paser Utara, *Paddock* di Paser dan Pabrik Pakan Mini di UPTD Api-Api Penajam Paser Utara.
16. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak telah dilakukan pembinaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan.
17. Pada tahun 2010 telah *dilaunching* Program Kredit Ternak Sejahtera melalui Bankatim dan telah disalurkan dana lebih dari Rp.4 Milyar kepada Peternak yang berada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Kabupaten Berau. Dengan Program Kredit Ternak Sejahtera akan membantu peternak dalam peningkatan skala usaha yang akan merubah usaha sambilan menuju ke usaha peternakan sebagai cabang usaha maupun usaha pokok. Pada tahun 2011 telah disalurkan dana Rp.6,038 Milyar di 13 Kabupaten/Kota kecuali Kab. Kutai Barat.

18. Produksi perikanan Kalimantan Timur yang bersumber dari perikanan laut dan perikanan darat tahun 2009 sebesar 237.383 Ton dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 306.621 Ton atau meningkat sebesar 23,55. Pada tahun 2011 produksi mencapai 378.830 Ton.
19. Produksi perikanan sebagaimana yang disebutkan di atas didukung oleh armada perikanan sebanyak 35.478 unit pada tahun 2008 menjadi 37.151 unit tahun 2009 atau naik sebesar 4,7%, tahun 2010 berjumlah 26.494 dan 28.732 unit pada tahun 2011 dan armada di perairan umum dari 26.470 unit tahun 2008 menjadi 25.817 untuk tahun 2009 atau turun 2,47%, untuk tahun 2010 sejumlah 17.010 unit dan tahun 2011 berjumlah 26.080 unit. Luas usaha perikanan dari kegiatan budidaya tambak pada tahun 2009 sebesar 89.247 Ha, budidaya kolam sebesar 4.265 Ha dan budidaya laut 3.105 Ha. Pada tahun 2011, budidaya tambak sebesar 175.344 Ha, kolam 4.838 Ha dan budidaya laut 4.911 Ha.
20. Pengembangan perikanan tahun 2010 dilakukan dengan pembuatan keramba sebanyak 150 unit yang diarahkan untuk bantuan pembudidayaan di Kutai Kartanegara, pengadaan mesin pakan ikan 5 unit untuk bantuan pengolah hasil perikanan di Tarakan, Berau, Samarinda masing-masing 1 unit dan Kukar

2 unit, pembuatan keramba jaring apung percontohan 5 unit di desa Berambay Samarinda Ilir. Bantuan lainnya berupa Benur di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sebanyak 2 juta ekor. Pada Tahun 2011 telah terbangun sebanyak 65.683 unit keramba di 13 Kabupaten/Kota.

21. Dalam rangka revitalisasi perikanan tangkap akan dikembangkan kapasitas tangkap dari 5 *Gross Ton* (GT) menjadi 30 GT. Dalam tahun 2011 tersedia 7 unit kapal 30 GT dengan alat tangkap *Purse seine*.
22. Dalam rangka pengembangan Kalimantan Timur sebagai provinsi koperasi, di Kalimantan Timur telah berkembang unit-unit koperasi dari 4.634 unit pada tahun 2009 menjadi 5.517 unit pada tahun 2010 dan 5.855 unit pada tahun 2011. Jumlah anggota tahun 2011 dari 426.235 orang meningkat 9,2% dari jumlah anggota tahun 2010 sejumlah 390.343 orang.
23. Dalam bidang usaha kecil dan menengah, telah dikembangkan 18.368 unit Usaha Mikro 388.886 unit usaha kecil dan 859 unit usaha menengah dengan klasifikasi usaha pada tahun 2011 terdiri dari 316.185 unit usaha industri, 55.028 unit usaha perdagangan dan pada tahun 135.900 unit usaha jasa.
24. Untuk pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah telah di salurkan dana bantuan kredit dari Bankaltim kepada kelompok-kelompok usaha sebesar Rp.1,76 Trilyun yang tersalur kepada 6.290 debitur serta kepada petani dan nelayan melalui program Kredit Sawit Sejahtera sebesar Rp.1,03 Milyar, program Ternak Sejahtera sebesar Rp.3,47 Milyar dan Kredit Perikanan Sejahtera Rp.1,35 Milyar. Total kredit yang disalurkan pada tahun 2010 sebesar Rp.9,58 Trilyun

meningkat tajam dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp.4,47 Trilyun, berarti dalam dua tahun atau 2009-2010) ada peningkatan penyaluran kredit sebesar 114%. Tahun 2011 Bankaltim menyediakan dana untuk kredit pengembangan UMKM dan kredit padi sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera sebesar Rp.1 Trilyun.

25. Capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2011, yaitu mencapai Rp.1.509 Trilyun atau naik 62,38% dari capaian tahun 2010. Sejak tahun 2009 KUR sebesar Rp.370,50 Milyar rupiah dan tahun Rp.929,44 Milyar. Kenaikan ini merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung menunjang peningkatan ekonomi Kalimantan Timur.
26. Sektor kepariwisataan telah dikembangkan beberapa sarana dan prasarana wisata, pengembangan obyek wisata pada tahun 2009 sebanyak 393 obyek wisata, pada tahun 2010 dan 2011 meningkat menjadi 401 obyek wisata. Sedangkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur untuk tahun 2009 sebanyak 1.155.674 orang terdiri dari Wisman 23.768 orang dan Wisnus 1.131.906 orang dengan pendapatan yang bersumber dari Wisnus Rp.393,93 Milyar dan Wisman US\$ 23.77 juta. Pada Tahun 2010 jumlah wisatawan sebanyak 278.591 orang (Wisman 24.410 orang dan Wisnus 1.174.626 orang) dengan pendapatan US\$ 24,41 juta dan Rp.416,92 Milyar atau meningkat 2,7% dari tahun 2009. Pada tahun 2011 kunjungan wisatawan sebanyak 1.303.855 orang (Wisman 25.264 orang) dan Wisnus 1.253.327 orang) dengan pendapatan yang

bersumber dari Wisman US\$ 25,264 Juta dan Wisnus Rp.451,19 Milyar.

27. Untuk mendukung pengembangan wisata bahari di gugusan Pulau Derawan, pada tahun 2011 sudah mulai dibangun bandara di Pulau Maratua Kabupaten Berau. Disamping itu juga dikembangkannya museum Mulawarman di Kutai Kartanegara.
28. Sektor kehutanan pada tahun 2008 lahan kritis seluas 5.762.225 Ha ditargetkan tahun 2013 turun menjadi 3.402.536 Ha melalui kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan serta program “*one man five trees*” sebanyak 7.628.145 pohon. Luas lahan kritis pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 5.186.002 Ha menjadi 4.663.352 Ha pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 sebesar 2.622.681,49 Ha. Jumlah titik api (*hotspot*) pada tahun 2008 sebanyak 1.255 titik, menurun menjadi 1.198 titik tahun 2009 dan 1.029 titik tahun 2010. Pada 2011 bertambah menjadi 1.501 titik, kemungkinan besar adanya musim kemarau.
29. Pelaksanaan program Kalimantan Timur Hijau berupa kegiatan penanaman berbagai jenis tumbuhan pada daerah-daerah lahan kritis, *eks* tambang dan lokasi lainnya melalui program 1 orang 5 pohon (*one man five trees*). Pada tahun 2010 telah dilakukan penanaman di seluruh Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut bantuan subsidi Provinsi ke Kabupaten/Kota yang rata-rata bantuannya sebesar Rp.500 juta per Kabupaten/Kota. Dukungan dari pihak swasta antara lain; PT. Total Indonesia pada tahun 2010 yang berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur telah melakukan penanaman mangrove di kawasan *Delta Mahakam* sebanyak 10 juta pohon

dan BPD Kalimantan Timur menanam 1.000 pohon tahun 2011. Pada tahun 2011 telah dilakukan penanaman sejumlah 21 Juta Pohon.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan penanaman mangrove di Kecamatan Marangkayu sebanyak 20 ribu pohon pada tahun 2009 dan telah dilaksanakan kegiatan pengamanan hutan lindung di Kabupaten Nunukan, hutan lindung Sungai Wain di Kota Balikpapan serta konservasi kawasan hutan lindung. Pada tahun 2008 mangrove mengalami kerusakan berat seluas 329.579 Ha dan terus mengalami perbaikan dengan menanam pohon mangrove dan pemeliharaan, diantaranya Marangkayu dan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanjung Batu Kabupaten Berau, sehingga pada tahun 2011 mengalami penurunan kerusakan seluas 178.202 Ha atau turun 15,05%. Selain mangrove telah dilakukan monitoring Terumbu Karang di lima Kabupaten/Kota, hasil menunjukkan bahwa kondisi mangrove rata-rata berada pada kategori baik; diantaranya Kabupaten/Kota Nunukan, Paser, Bontang, Berau dan Paser Penajam Utara. Kerusakan padang lamun dan terumbu karang salah satu penyebabnya adalah bom ikan dan sedimentasi.

30. Penilaian kinerja perusahaan Industri dan Jasa (*proper*) dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah dilakukan penilaian 28 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 1 emas, 9 hijau, 13 biru dan sisanya merah. Tahun 2010 telah dilakukan penilaian 34 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 9 hijau, 16 biru, 5 merah dan sisanya hitam. Pada tahun 2011 sebanyak 34 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 10 hijau, 19 biru dan

sisanya 2 merah, 1 hitam. Sedangkan penilaian kinerja perusahaan pertambangan batubara (*proper*), telah dilakukan penilaian 34 perusahaan pada tahun 2010, dengan perolehan 1 emas, 13 hijau, 15 biru dan sisanya 5 merah. Tahun 2011 telah dilakukan penilaian 37 perusahaan, dengan perolehan 2 emas, 17 hijau, 14 biru dan sisanya 4 merah. Untuk penilaian kinerja perusahaan HPHTI/IUPHHK-KT, telah dilakukan penilaian 9 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 2 hijau, 7 biru, pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 6 perusahaan dengan perolehan 2 hijau, 4 biru, tahun 2011 telah dilakukan penilaian 5 perusahaan dengan perolehan 1 hijau dan 4 biru. Pekan Lingkungan Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2009 peringkat juara Harapan III, tahun 2010 juara 2 dan tahun 2011 sukses menjadi juara 1.

31. Ekspor Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar US\$ 38,21 Milyar mengalami kenaikan sebesar 52,11% dibanding tahun 2010 sebesar US\$ 25,12 Milyar dan pada tahun 2009 sebesar US\$ 18,92 Milyar. Kenaikan ekspor tahun 2011 disebabkan oleh naiknya ekspor migas sebesar 66,96% yakni dari US\$ 11,32 Milyar menjadi US\$ 18,90 Milyar. Sementara ekspor non migas juga mengalami peningkatan sebesar 40% dari US\$ 13,80 Milyar menjadi US\$ 19,32 Milyar. Realisasi ekspor non migas tahun 2010 didominasi oleh sektor pertambangan dengan produk batu bara dengan total share sebesar 87,58% atau senilai US\$ 11,35 Milyar, bahan kimia anorganik dengan nilai US\$ 368,38 juta, kayu atau bahan dari kayu 2,81% dengan nilai US\$ 363,13 juta, lemak dan minyak nabati 2,61% dengan nilai

US\$ 337,8 juta, bahan kimia organik 1,19% dengan nilai US\$ 153,92 juta.

32. Ekspor Provinsi Kalimantan Timur dengan Negara tujuan Jepang pada tahun 2011 adalah yang tertinggi mencapai US\$ 12,54 Milyar atau sebesar 32,83% dari total seluruh ekspor Provinsi Kalimantan Timur. Negara tujuan ekspor terbesar kedua adalah China termasuk Taiwan dengan nilai ekspor mencapai US\$ 9,10 Milyar atau 22,57% dan selanjutnya *Republic Korea Selatan* dengan nilai ekspor US\$ 6,30 Milyar atau 16,45%. Sehingga nilai ekspor ketiga Negara ini mencapai 73,10% dari total ekspor Kalimantan Timur.
33. Sementara itu, realisasi impor sampai tahun 2011 mencapai US\$ 7,22 Milyar yang berasal dari negara Asia, seperti Aljerbaijan senilai US\$ 1,45 Milyar atau 20,08% dari total impor, Malaysia US\$ 1,23 Milyar atau 17,04%, Nigeria US\$ 0,75 Milyar atau 10,43%, Singapura US\$ 692,91 Juta atau 9,60%, US\$ 366,00 Juta atau 5,07%.
34. Dengan memperhatikan besaran ekspor impor, tahun 2011 Kalimantan Timur mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US\$ 31 Milyar.
35. Dalam rangka peningkatan ekspor non migas ini telah dilakukan beberapa kegiatan promosi baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional, pengadaan sarana pengujian laboratorium, monitoring lapangan oleh komisi eropa khusus untuk usaha perikanan, pengembangan usaha primer yang ramah lingkungan, *Focus Group Discussion* (FGD) dengan negara-negara importir.



36. Dalam rangka menunjang seluruh kegiatan pembangunan daerah, terutama dengan ditetapkannya klaster industri berbasis komoditas unggulan dan berorientasi ekspor maka diperlukan ketersediaan listrik yang cukup disamping untuk kebutuhan seluruh kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.
37. *Cluster* industri yang berbasis gas dan kondensat, terutama produk petrokimia yang terletak di kawasan industri Bontang dengan produk kimia berupa *urea*, *amoniak*, *soda ash* dan *methanol*. Sedang yang dalam proses penyelesaian proyek pembangunannya adalah *ammonium nitrat*. Selain itu, akan dilakukan penambahan kapasitas produksi urea dengan rencana pembangunan pabrik *urea* unit 5.
38. Batubara menjadi primadona Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai cadangan sampai tahun 2011 sebesar 8,184 Milyar Ton, produksi tahun 2009 sebesar 123,26 juta Ton, tahun 2010 sebesar 140,75 juta Ton naik 14,19% dan tahun 2011 produksi sebesar 204,99 juta Ton naik 45,64%, prediksi umur tambang 50 tahun dengan asumsi produksi sebesar 150 Juta Ton/tahun. Jumlah produksi tersebut terdiri dari 33 ijin PKP2B., Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 1.386 atau total ijin di Kalimantan Timur sebanyak 1.419 ijin.
39. Penerimaan negara dari *royalty* batubara dan iuran tetap di Kalimantan Timur tahun 2009 Rp.3,41 Trilyun, tahun 2010 Rp.3,46 Trilyun dan tahun 2011 Rp.4,56 Trilyun.
40. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk migas terdapat 63 WKP, yang terdiri dari 29 WKP status eksploitasi dan lainnya masih eksplorasi, produksi minyak bumi tahun 2008

sebesar 55,94 juta barrel, tahun 2009 sebesar 56,15 juta barrel dan tahun 2010 sebesar 56,79 juta barrel relatif stabil, tahun 2011 sebesar 53,02 juta barrel atau sedikit menurun dari tahun 2010 yang disebabkan menurunnya produksi sumur-sumur tua. Produksi gas bumi pada tahun 2008 sebesar 1.080 juta MMBTU, tahun 2009 sebesar 1.048 juta MMBTU, tahun 2010 sebesar 1.045 Juta MMBTU sedangkan untuk tahun 2011 sebesar 911 Juta MMBTU dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama atas dukungan infrastruktur proyek South Mahakam 1 dan 2 akan beroperasi untuk meningkatkan produksi gas.

41. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009, telah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg ke rumah tangga dan usaha kecil, yang sebelumnya dilakukan sosialisasi bersama SKPD terkait dan PT. Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, sampai tahun 2011 telah terealisasi sebesar 82,02%, dan untuk tahun 2012 ini ditargetkan mencapai 100%.
42. Capaian hasil pembangunan bidang ketenagalistrikan tahun ketiga RPJMD sampai tahun 2011 untuk pembangkit listrik oleh PT.PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2008 daya terpasang sebesar 460,59 MW, daya mampu sebesar 313,33 MW dengan beban puncak 286,37 MW, tahun 2011 daya terpasang menjadi 654,4 MW atau naik 42,07%, mampu menjadi 488,7% atau naik 55,98%, beban puncak menjadi 448,8 MW atau naik 56,70%. Perkembangan panjang jaringan tahun 2008 untuk jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 4.500,89 Kms, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 4.542,22 Kms, tahun 2011 untuk JTM menjadi sepanjang

4.864,87 Kms atau naik 8,1%, JTR menjadi sepanjang 5.326,96 Kms atau naik 17,3%. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) tahun 2008 terpasang 3 unit dan tahun 2011 menjadi 6 unit, sedangkan pembangkit listrik tenaga biogas tahun 2008 sebanyak 1 unit, tahun 2011 menjadi 8 unit. Untuk PLTS tahun 2008 terpasang 14.213 unit yang tersebar 275 desa dan tahun 2011 PLTS terpasang 24.129 unit yang tersebar 469 desa atau naik 70,5%. Rasio elektrifikasi desa berlistrik di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sebanyak 1.121 desa atau sebesar 78% dan tahun 2011 sebanyak 1.230 desa atau sebesar 85,77%.

43. Jika cadangan tenaga listrik seharusnya 35% dari beban puncak maka total daya listrik menjadi 940 MW hingga tahun 2013. Untuk mengatasi persoalan kekurangan kelistrikan di Kalimantan Timur, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain: pembangunan PLTU 2x100 MW bekerjasama dengan PLN, PLTU Sewa PLN 2 x (120 s/d 150) MW PLTU 2 x 25 MW kerjasama dengan Perusda Balikpapan PT. Gunung Bayan di Kariangau, PLTG Senipah 2 x 41 MW, PLTU Cahaya Fajar Kalimantan Timur (CFK) 1 x 50 MW dan PLTU Bakri *Power* 2 x 100 MW di Sangatta.

### **AGENDA TIGA, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.**

Di samping pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Pembangunan SDM dilakukan melalui peningkatan kualitas

pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Capaian pembangunan sumber daya manusia diindikasikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kalimantan Timur dari 74,52 tahun 2008 menjadi 75,11% tahun 2009, dan Tahun 2010 mencapai 75,56% dan IPM Kalimantan Timur telah melampaui rata-rata Nasional yang baru mencapai nilai 71,17% dan Kalimantan Timur menempati peringkat lima. Sebagian besar Kabupaten/Kota nilai IPM telah di atas rata-rata nasional, seperti Kota Balikpapan pada rangking 12 Nasional, Kota Samarinda rangking ke 34, Kota Bontang pada rangking 37, Kota Tarakan rangking ke 38, sementara Kabupaten lainnya berkisar antara rangking 80 s/d 221 dari jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 497 se-Indonesia.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pendidikan tahun ketiga RPJMD 2009-2013 diantaranya:

Program “KALIMANTAN TIMUR CEMERLANG” (Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang) dan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan upaya pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan 20%, alokasi dana fungsi pendidikan mengalami peningkatan dari Rp.798,98 Milyar pada Tahun 2008 menjadi Rp.1,49 Trilyun Tahun 2011. Melalui Alokasi dana tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dari 110,38% tahun 2009 menjadi 105,02% tahun 2011. Sementara untuk APK SLTP/MTs dari 88,61% tahun 2009, tahun 2011 menjadi 97,94%, sedangkan APK SLTA/MA dari 72,38% tahun 2010 menjadi 74,53% tahun 2011 atau berada di atas rata-rata nasional atau 69,60%. APK Perguruan Tinggi sebesar 14,76% tahun 2009 dan 15,96% tahun 2010.

Selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, dimana untuk usia 7-12 tahun 93,74% di tahun 2009 dan tahun 2011 menjadi 92,23%. Pada usia 13-15 tahun 72,06% tahun 2010 menjadi 72,40% tahun 2011. Sedangkan pada anak usia 16-18 tahun, angka partisipasi murni 53,10% di tahun 2009, 54,58% di tahun 2011.

Kemudian untuk melek huruf penduduk usia 10 tahun keatas di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dimana tahun 2009 mencapai 97,18% dan tahun 2011 menjadi 97,26%.

Melalui pendidikan Pemerintah Provinsi dari tahun ke tahun secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pendidikan antara lain melalui (1) Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tahun 2010 sebanyak 24 RSBI dan tahun 2011 menjadi 29 RSBI di 14 Kabupaten/Kota. (2) Penambahan penghasilan Guru (insentif), dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru di semua jenjang pendidikan baik Negeri maupun Swasta dengan alokasi dana Rp.222,048 Milyar tahun 2011 dengan jumlah guru 61.680 orang; (3) BOSDA, diarahkan untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah menengah atas dan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebanyak Rp.144,076 Milyar tahun 2010 untuk siswa SMA/MA/Kejuruan sebanyak 115.261 siswa dan terus meningkat menjadi Rp.163,605 Milyar tahun 2011 sebanyak 130.884 siswa; (4) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru ke jenjang S1/D IV dan S2, kualifikasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi juga tetap memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan, karena pada dasarnya pembangunan dibidang

kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling karena ketiga fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Perkembangan fasilitas penunjang kesehatan di Kalimantan Timur menunjukkan adanya indikasi semakin membaik, khususnya perkembangan sarana Puskesmas. Pada tahun 2011 Puskesmas di Kalimantan Timur tercatat 1.129 unit, yang terdiri dari Puskesmas Induk sebanyak 219 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 695 unit serta Puskesmas Keliling sebanyak 215 unit. Disamping ketersediaan Puskesmas, jumlah rumah sakit di Kalimantan Timur pada tahun 2011 48 unit yang terdiri dari rumah sakit umum daerah 18 unit, rumah sakit swasta 12 unit, rumah sakit TNI 4 unit dan rumah sakit BUMN 2 unit dan rumah sakit khusus 12 unit, semakin berkembang dalam membenahi dan melengkapi fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut.

Peningkatan jumlah sarana kesehatan tersebut ternyata juga diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan tenaga medis di Kalimantan Timur tahun 2011, meliputi dokter umum sebanyak 1.001 orang, dokter spesialis 238 orang, dokter gigi 317 orang dan bidan 1.690 orang, perawat 5.175 orang serta perawat gigi 132 orang. Disamping itu para tenaga ahli kesehatan juga semakin berkembang seiring dengan kebutuhan tenaga medis.

Peningkatan jumlah kapasitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit serta jumlah tenaga kesehatan ini telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diindikasikan oleh penurunan angka kematian bayi tahun 2009 dari 19/1000 kelahiran menjadi 16,7/1000 kelahiran hidup tahun 2011. Demikian pula dengan *prevalensi* Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi di Kalimantan Timur semakin menurun dari 19,3% tahun 2009 menjadi 17,1% tahun 2010, kemudian tahun 2011 menjadi 10,47%.

Alokasi anggaran kesehatan melalui APBD Provinsi semakin meningkat, tahun 2009 sebesar 8,56%, tahun 2010 mencapai 13,84% dan tahun 2011 sebesar 10,81% dari total APBD, telah memenuhi amanah UU 34 Tahun 2009. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan *prevalensi* penyakit malaria dikarenakan kondisi geografis Kalimantan Timur dengan kawasan hutan yang luas merupakan daerah endemi malaria, *prevalensinya* 7,96 per 1000 penduduk pada tahun 2010 dan *prevalensi* HIV/AIDS 5,24% pada tahun 2010.

Penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Agenda Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan searah dengan kebijakan pemerintah untuk menyusun *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) yang focus pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Empat Klaster, yaitu Klaster pertama, Bantuan dan Jaminan Sosial; Klaster kedua, Pemberdayaan Masyarakat; Klaster ketiga Pemberdayaan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Klaster

keempat, Program Pro-Rakyat. Program-program pengentasan kemiskinan tersebut, diarahkan pada program-program pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 324.800 orang atau 11,04%, tahun 2008 turun 259.450 orang atau 8,53%, tahun 2009 turun menjadi 239.220 orang atau 7,86% dan berdasarkan data statistik BPS Kalimantan Timur pada tahun 2010 berjumlah 243.000 atau 7,66% dan kemudian tahun 2011 sebesar 247.130 atau 6,63% yang berarti terdapat penurunan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,89%. Dengan demikian selama tiga tahun ini, terdapat sekitar 12.320 orang yang keluar dari kemiskinan. Walaupun jumlah penduduk miskin turun signifikan dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, namun dilihat menurut Kabupaten/Kota, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu masih minimnya infrastruktur transportasi yang memberikan akses pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam upaya peningkatan kesehatan bagi keluarga miskin, disamping pemberian Jamkesmas melalui APBN juga diberikan Jamkesda melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Disamping itu beberapa upaya untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, antara lain perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial juga dilakukan melalui Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkessos) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) bagi transmigrasi dan pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT); pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis potensi unggulan daerah di Bontang, Balikpapan, Samarinda dan



Tarakan; peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan); PNPM-Mandiri Perkotaan, Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota; fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dan pengembangan kawasan pemukiman; jalan dan jembatan di wilayah perbatasan; bantuan permodalan bagi UMKM; modal usaha dan saprodi bagi usaha tani, perkebunan rakyat, nelayan dan peternak; fasilitasi bantuan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Akan tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur walaupun menunjukkan prosentase yang selalu menurun (Menurut data Sakernas tahun 2010 TPT tercatat 10,10% menjadi 9,84% pada tahun 2011 masih berada di atas rata-rata nasional. Dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kesempatan tenaga kerja di sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) hal ini terlihat di subsektor Perkebunan dengan menyerap tenaga kerja tahun 2008 sebanyak 324.137 orang, kemudian pada tahun 2009 sebanyak 344.671 orang, tahun 2010 sebanyak 374.312 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 382.386 orang yang bekerja pada perkebunan karet, kelapa dalam, kelapa sawit, lada, kopi dan komoditi lainnya. Sejalan dengan peningkatan potensi kesempatan kerja tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas kesempatan kerja dan berusaha, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan revitalisasi Balai

Latihan Kerja, BLK di Bontang, Revitalisasi BLKI Balikpapan, Berau, Nunukan dan Kutai Barat.

## **B. Urusan Wajib yang Dilaksanakan**

Program dan kegiatan prioritas urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2011, adalah :

### **I. Urusan Pendidikan, dengan SKPD pelaksana :**

#### **Dinas Pendidikan**

##### **1. Program dan kegiatan :**

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2011 menetapkan 14 program dan 111 kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan Pemerintah Daerah dan merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan yang nyata, program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

##### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2011 Anggaran Pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 324.220.848.440,- terealisasi Rp. 274.598.078.437, dengan capaian kinerja 84,69 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

##### **1. Program Peningkatan Kapasitas**

###### **Sumber Daya Aparatur**

- Pendidikan dan pelatihan formal.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- Pameran keliling.
- Seminar, lomba, simposium.

##### **2. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa.

##### **3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

- Pembangunan gedung sekolah terpadu.

- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah.
  - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa.
  - Pelatihan penyusunan kurikulum.
  - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.
- 4. Program Pendidikan Menengah**
- Pembangunan gedung sekolah (SMK).
  - Penambahan ruang kelas sekolah (SMK).
  - Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi.
  - Lomba dan pertandingan tingkat SMA.
  - Peningkatan mutu pendidikan.
  - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.
- 5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Pengelolaan keuangan daerah.
- 6. Program Pendidikan Non Formal**
- Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.
  - Pengembangan Pendidikan keaksaraan.
  - Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
  - Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal.
  - Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.
- 7. Program Pendidikan Luar Biasa**
- Pembangunan ruang serba guna/aula.
- 8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan**
- Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
  - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan.
  - Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga pendidikan.
  - Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
  - Pengadaan Ijazah SD, Penghimpunan dan pemusnahan blanko.
  - Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (kegiatan kualifikasi pendidikan guru).

**9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan(Sekretariat)**

- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Sosialisasi dan promosi pendidikan.
- Pengembangan sekolah unggulan RSBI/SBI.
- Pemutakhiran *database* pendidikan Kaltim.
- Pengadaan laptop untuk RSBI.
- Penerbitan jurnal ilmiah pendidikan.
- Penganugerahan penghargaan pendidikan tingkat Kaltim (*education awards*).

**10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat)**

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunitas, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

APBD-P

**11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (APBD-P)**

- Pembangunan Gedung Kantor

### **12. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

- Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dan buku laporan hasil belajar.

### **13. Program Pendidikan Menengah**

- Pengadaan Meubelair sekolah.
- Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi.

### **UPTD PKB**

### **14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

### **15. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana**

#### **Aparatur**

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

### **16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

### **17. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**

#### **Aparatur**

- Biaya kontribusi mengikuti pameran.

- Penulisan dan pencetakan bulletin 3 kali setahun.
- Pencetakan dan penulisan buku panduan.

#### **18. Program Pendidikan Non Formal**

- Pemberdayaan tenaga pendidik non formal.
- Pemberian operasional pendidikan non formal.
- Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.
- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal.
- Pengembangan kurikulum, bahan ajar & model pengajaran non formal.
- Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal.
- Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

#### **19. Program Peningkatan Mutu Pendidikan & Tenaga Kependidikan**

- Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Pengembangan sistem penghargaan & perlindungan terhadap profesi guru.

#### **20. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

- Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan.

#### **UPTD Tekkom & Infodik**

#### **21. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

#### **22. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur**

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

#### **23. Program peningkatan disiplin aparatur**

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

#### **24. Program pendidikan menengah**

- Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi & komunikasi.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

- a. Semua dana yang sifatnya bantuan harus melalui Biro Sosial berdasarkan Permendagri Nomor : 30 Tahun 2007, padahal sudah tercantum pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Prov.Kaltim sehingga tidak dapat direalisasikan.
- b. Terbatasnya waktu pelaksanaan karena terlambatnya pengesahan SK dan DPA-SKP.
- c. Dana merupakan hasil dari sisa tender pengadaan barang dan jasa serta efisiensi penggunaan dana yang tidak mempengaruhi pencapaian realisasi fisik.
- d. Ada beberapa program yang telah dianggarkan APBN namun telah diusulkan pada anggaran APBD sehingga tidak dilaksanakan lagi.

Solusi :

- a. Diharapkan dana persediaan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim cukup tersedia.
- b. SK maupun pengesahan DPA-SKPD diharapkan terbit pada awal Januari tahun yang sedang berjalan.

## **II. Urusan Kesehatan, dengan SKPD Pelaksana :**

### **a. Dinas Kesehatan, dengan :**

#### **1. Program dan kegiatan :**

Untuk mendukung kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 12 program dan 52 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :**

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari APBD. Pada tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp. 65.227.460.200,- terealisasi Rp.52.693.395.221 , dengan capaian kinerja 81,56 persen. Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Tersedianya kebutuhan surat menyurat.

##### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Tersedianya perlengkapan kantor.

##### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Tersedianya pakaian dinas.

##### **d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS**

- Terlaksananya pindah tugas.

##### **e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Pegawai Dinkes Prov. Kaltim yang dilatih *short course adeliède,e-proc* dan peningkatan SDM.

##### **f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Tersusunnya pelaporan kinerja LAKIP, LPPD, Indikator kinerja Dinkes Prov. Kaltim.

##### **g. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

- Tersedianya obat-obatan program dan *bufferstok*.

##### **h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

- Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas 24 jam di 14 Kabupaten/Kota.



- i. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**
  - Terlaksananya penyuluhan kesehatan masyarakat di 14 Kabupaten/Kota.
- j. Program Perbaikan Gizi Masyarakat**
  - Tersedianya peta masalah gizi di 14 Kabupaten/Kota.
- k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat**
  - Terlaksananya pengembangan lingkungan sehat.
- l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**
  - Terlaksananya pemantauan *fogging* fokus di 14 Kabupaten/Kota.
- m. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**
  - Terlaksananya penyusunan standar kesehatan.
- n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**
  - Terselenggaranya kemitraan asuransi/jaminan kesehatan masyarakat di 14 Kabupaten/Kota.
- o. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan**
  - Diperolehnya data dan informasi yang kuat di 14 Kabupaten/Kota.
- p. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
  - Terlaksananya Pendataan aset/barang milik daerah.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Kalimantan Timur masih mengalami masalah tingginya angka kesakitan, yaitu beberapa penyakit menular tertentu masih menunjukkan angka prevalensi yang cukup tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang bermakna, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan vektor masih rendah, serta belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat sebagian masyarakat, disebabkan :

- a. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat promotif preventif.
- b. Ketentuan pelaksanaan APBD diterima pada awal tahun namun karena mekanisme pengelolaan anggaran hanya

menggunakan alokasi dana uang persediaan (UP) untuk membiayai seluruh kegiatan dan pada akhir tahun.

**b. RSUD. A.Wahab Syahrani, dengan :**

**1. Program dan kegiatan :**

Untuk mendukung kebijakan RSUD. A. Wahab Syahrani Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 10 program dan 34 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2011 Anggaran Dinas Kesehatan dari APBD dialokasikan sebesar Rp. 344.655.110.400,- terealisasi Rp.284.090.567.976,01, dengan capaian kinerja 82,43 persen.

**c. RSUD. Kanujoso Djatiwibowo, dengan:**

**1. Program dan Kegiatan :**

Untuk mendukung kebijakan RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 10 program dan 37 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2011 Anggaran RSUD. Kanujoso Djatiwibowo dari APBD dialokasikan sebesar Rp. 262.907.700.800,- terealisasi Rp.228.585.474,49, dengan capaian kinerja 87 persen.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2011 terdapat permasalahan yang timbul diantaranya :

- a. setiap tahapan kegiatan tidak semua kegiatan terakomodir karena menyangkut tersedianya dana/biaya yang diperlukan serta ditinjau pula dari segi tingkat prioritas dan kebutuhan.

Solusi :

- a. Solusi yang dapat diambil pada permasalahan ini adalah mengadakan analisa kebutuhan di setiap bidang kegiatan

seperti analisa kebutuhan pegawai, analisa keuangan, peralatan dan perlengkapan yang menunjang peningkatan pelayanan di rumah sakit.

**d. RSK Atma Husada, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung kebijakan RSK. Atma Husada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 10 program dan 36 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal yang tertuang pada RPJMD SKPD.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran :**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2011 Anggaran RSK. Atma Husada dari APBD dialokasikan sebesar Rp. 22.099.793.600,- terealisasi Rp.20.007.649.066, dengan capaian kinerja 90,53 persen.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum kondisi pelayanan RSJD. Atma Husada Mahakam tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup baik, namun kualitas pelayanan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan jumlah tempat tidur kelas III di rumah sakit masih tidak mampu menampung seluruh pasien tidak mampu/kelas III yang sesuai standar. Juga Sumber Daya Manusia yang profesional di lingkungan RSJD. Atma Husada Mahakam yang masih sangat terbatas.

Solusi:

- a. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana RSJD. Atma Husada Mahakam agar dapat memenuhi kebutuhan pasien rumah sakit baik di rawat jalan dan rawat inap.
- b. Pada tahun anggaran berikutnya lebih memfokuskan penganggaran untuk menambah tempat tidur pada ruang rawat inap kelas III dengan membangun gedung baru khusus perawatan pasien kelas III.
- c. Menambah tenaga (SDM) RSJD. Atma Husada Mahakam yang memiliki potensi dan keahlian dalam rangka meningkatkan pelayanan serta manajemen rumah sakit.
- d. Menambah pelayanan 24 jam di RSJD. Atma Husada Mahakam misalnya Apotek 24 jam, Rekam Medis 24 Jam dan pelayanan 24 jam lainnya yang menunjang pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat yang telah melayani pasien selama 24 jam.

**e. RSUD Tarakan, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung RSUD.Tarakan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 9 program dan 22 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari berbagai sumber dari APBN dan APBD. Pada tahun 2011 Anggaran RSUD Tarakan dialokasikan sebesar Rp. 98.628.327.000,- terealisasi Rp.92.923.916.265, dengan capaian kinerja 94,22 persen.

**f. Badan Narkotika Provinsi**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 15 program dan 38 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2011 Anggaran BNP dialokasikan sebesar Rp. 10.594.071.900,- terealisasi Rp.8.924.369.195, dengan capaian kinerja 84,24 persen.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan tersebut yaitu, rencana penyediaan lahan untuk pembangunan Pusat Terapi dan Rehabilitasi yang rencananya alokasi melalui anggaran APBD Tahun 2011, mengingat BNP akan menjadi Instansi Vertikal maka untuk penyediaan lahan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ex. Rumah Sakit Kusta di Loa Kulu Kutai Kertanegara dan Bangunan melalui anggaran BNN.

**III. Urusan Lingkungan Hidup**

**Badan Lingkungan Hidup, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ditetapkan dalam Program Rutin dan Pembangunan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur ada 8 program dan 43 kegiatan.

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin Badan Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2011 Anggaran BLH dialokasikan sebesar Rp. 15.268.777.400,- terealisasi Rp.12.892.333.905,- dengan capaian kinerja 84,44 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.
- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS.
- Penyediaan jasa tenaga tertentu.

### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

#### **Aparatur**

- pengadaan Kendaraan dinas/operasional.
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- Pengadaan mebeleur.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

### **c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

### **d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**

#### **Aparatur**

- Pendidikan dan pelatihan formal.

**e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

- Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura.
- Koordinasi penilaian langit biru.
- Pemantauan kualitas lingkungan.
- Pengelolaan B3 dan Limbah B3.
- Pengkajian dampak lingkungan.
- Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (*Proper*), *Proper* HPH, *Proper* Batubara, *Proper* Industri dan jasa.
- Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih.
- Pengembangan produksi ramah lingkungan.
- Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Mangrove.
- Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- Rakor Regional Pengelolaan LH.

**f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- Kalpataru.
- Koordinasi pengendalian kerusakan hutan dan lahan (Kegiatan Menuju Indonesia Hijau).

**g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

- Pengembangan data dan informasi lingkungan.
- Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- Pengembangan SDM Pengelolaan LH.
- Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah.
- Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pelatihan Adiwiyata.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Timur pada dasarnya menuntut perhatian seluruh pelaku pembangunan yakni pemerintah (*stake holder*), masyarakat dan pihak swasta/perusahaan, agar masalahnya tidak menjadi semakin besar dan lebih kompleks.

**IV. Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Tata Ruang & Perumahan :  
Dinas Pekerjaan Umum, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Sebagaimana pelaksanaan Program prioritas yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 telah melaksanakan 28 program dengan beberapa kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran SKPD DPU Provinsi Kaltim tahun 2011 sebesar Rp. 1.479.370.540.918,- setelah perubahan menjadi Rp. 1.860.989.554.918,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.548.734.778.241,- dengan capaian kinerja 83,22 persen. Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

Bidang Penataan Ruang

**a. Program perencanaan Tata Ruang**

- Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan.
- Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang.
- Pelatihan aparat tentang rencana tata ruang.
- Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas Kabupaten/Kota.
- Jasa konsultasi penyusunan sinkronisasi program pengembangan kawasan Perbatasan KASABA.
- Jasa konsultan pengawasan.

**b. Program Pemanfaatan Ruang**

- Penyusunan norma, standar, dan kinerja pemanfaatan ruang.
- Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang.
- Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.
- Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota.

**c. Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi**

- Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait.
- Forum jasa konstruksi.
- Fasilitasi sertipikat tenaga terampil jasa konstruksi.
- Pelatihan *e-procurement* bagi penyedia Jasa.
- Pelatihan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) bagi penyedia jasa.

**d. Program Pengawasan Jasa Konstruksi**

- Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi.

Bidang Sumber Daya Air

**a. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa-Rawa Dan Jaringan Lainnya**

- Perencanaan pembangunan jaringan irigasi.
- Perencanaan pembangunan reservoir.
- Perencanaan normalisasi saluran sungai.
- Pembangunan reservoir.
- Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.
- Pembangunan jaringan tata air daerah rawa.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**b. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku**

- Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.
- Peningkatan distribusi penyediaan air baku.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**c. Program Pengendalian Banjir**

- Pembangunan reservoir pengendali banjir.
- Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.
- Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai.
- Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali.
- Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir.
- Pembangunan prasarana pengaman pantai.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.



#### Bidang Bina Marga

- a. **Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan**
  - Perencanaan pembangunan jalan.
  - Perencanaan pembangunan jembatan.
  - Pembangunan jalan.
  - Pembangunan jembatan.
  - Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.
- b. **Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan**
  - Pemeliharaan jalan.
  - Pemeliharaan jembatan.
  - Rehabilitasi jalan.
- c. **Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong**
  - Perencanaan saluran *drainase*.
  - Pembangunan saluran *drainase*.
- d. **Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**
  - Perencanaan turap/talud/bronjong.
  - Penanganan longsor.
- e. **Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan**
  - Inspeksi kondisi jalan.

#### Bidang Cipta Karya

- a. **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
  - Pembangunan gedung di lingkungan Pemprov Kaltim.
  - Penataan bangunan dan lingkungan di Pemprov Kaltim.
  - Pembangunan VVIP Room Bandara.
  - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- b. **Program Pengembangan Perumahan**
  - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu.
  - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.
- c. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah**
  - Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.
  - Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum.
  - Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP).
- d. **Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh**
  - Pembangunan/peningkatan infrastruktur.

**e. Program Peningkatan Pelayanan Publik**

- Pembangunan Convention Hall

**3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan umum yang menghambat pelaksanaan program/kegiatan pada :

**Sumber Daya Air :**

- a. Pembebasan Tanah.
- b. Tambang.
- c. Petani.

**Bina Marga :**

- a. Jalan yang ada saat ini sebagian besar merupakan jalan eks HPH dan Tambang, sehingga pembangunannya tidak direncanakan menurut standar yang baik.
- b. Banyaknya kendaraan dengan Tonase yang melebihi kapasitas jalan ( $> \text{MST } 8 \text{ Ton/Kelas IIIa}$ ).
- c. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) oleh instansi terkait terhadap para pelaku pelanggaran angkutan beban lebih (*over load*) dan penertiban ukuran kendaraan.
- d. Belum terlaksananya penanganan jalan secara terprogram sampai *final surface*.
- e. Kondisi tanah yang sangat labil sehingga terjadi longsoran-longsoran atau patahan yang tidak terduga.
- f. Terbatasnya material yang berkualitas untuk konstruksi jalan sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain.
- g. Belum tuntasnya penyelesaian pembangunan jalan lintas Kalimantan poros selatan dan poros tengah.
- h. Pembangunan jalan lintas Kalimantan poros tengah dan koridor perbatasan masih dalam tahap pembangunan secara bertahap.

**Cipta Karya :**

- a. Belum sinkronisasi Program antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya.
- b. Masalah pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan pasca konstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Solusi Dan Saran :**

- a. Sebelum pembangunan fisik, Kabupaten/Kota harus menyelesaikan terlebih dahulu pembebasan lahan, sehingga alokasi fisik yang telah dianggarkan dapat digunakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- b. Untuk mengatasi permasalahan penanganan jalan tersebut dapat dibiayai dengan sistem kontrak Multiyears. Untuk pelaksanaan fisik yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun (secara bertahap), pendanaan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang dilakukan secara berkesinambungan.
- c. Perlu adanya Sinkronisasi program antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya.
- d. Dapat dilakukan secara bersama-sama (*sharing*) melalui pendanaan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBN dan *Loan*.

## **V. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik**

### **a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pelaksana urusan wajib Perencanaan Pembangunan dengan 14 Program dan 52 Kegiatan pada tahun 2011 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2011, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola anggaran sebesar Rp.53.321.1123.240 - dan terealisasi Rp. 46.114.772.836,- dengan capaian kinerja 88,14 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun *output* utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

#### **a. Program pengembangan data/informasi**

- Penyusunan profile daerah.
- Sistem informasi dan updating data.

#### **b. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**

- Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

**c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**

- Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

**d. Program perencanaan pembangunan daerah**

- Penyusunan rancangan RKPD.
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.
- Penetapan RKPD.
- Kajian perencanaan pembangunan daerah.
- Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kalimantan Timur.

**e. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**

- Penyusunan perencanaan pengembangan prasarana wilayah.

**f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

- Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Belum terbangunnya satu data informasi yang bisa dipakai sebagai perencanaan dan monitoring pembangunan daerah.
- b. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang ahli dalam merumuskan, mengkaji dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- c. Perencanaan harus mampu memformulasikan dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Perencanaan harus mampu mengubah ketergantungan daerah pada sumbangan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui dengan menggali dan pengelola potensi SDA yang dapat diperbaharui.
- e. Perencanaan harus mampu memformulasikan alokasi anggaran belanja publik lebih besar dari belanja aparatur.
- f. Perencanaan harus mampu menentukan prioritas pembangunan dan memberikan alokasi anggaran yang proporsional terhadap prioritas tersebut.

- g. Perencanaan harus mampu menyusun formasi bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, sehingga stimulan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- h. Masih terdapat 5 (lima) isu strategis daerah yang merupakan program perencanaan pembangunan daerah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat.

Beberapa upaya/solusi peningkatan kualitas perencanaan yang harus diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

- a. Membangun dan mensinergikan satu data yang menjadi acuan perencanaan pembangunan di daerah dengan melibatkan stake holder yang bias membantu.
- b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami perencanaan dalam merumuskan, mengkaji serta mengevaluasi pembangunan daerah.
- c. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara vertikal (Pusat dan Kabupaten/Kota) maupun horisontal (antar wilayah/lembaga) secara aktif.
- d. Memperhatikan dan menganalisa isu strategis pada lingkungan global, nasional, regional dan daerah.
- e. Peninjauan kembali struktur BAPPEDA (penyesuaian dengan beban kerja).

**b. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal sebagai pelaksana urusan wajib Perencanaan Pembangunan dengan 6 Program dan 25 Kegiatan pada tahun 2011 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2011, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola anggaran sebesar Rp. 11.961.803.460 dan terealisasi Rp. 9.473.009.120,- dengan capaian kinerja 79,19 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun *output* utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

**a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**

- Terlaksananya penyusunan Buku *Database* Kawasan Perbatasan.
- Tersusunnya Buku *Database* Daerah Tertinggal.
- Tersusunnya Rencana Pengembangan Wilayah Kecamatan Long Pahangai.
- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Terlaksananya Rapat koordinasi percepatan pembangunan perbatasan.
- Tersusunnya Buku Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan.
- Terlaksananya Pembuatan Buletin.
- Tersusunnya Buku Kawasan Perbatasan.
- Terlaksananya Sosialisasi UMKM.
- Terlaksananya Pembinaan lembaga sosial masyarakat wilayah perbatasan.
- Terlaksananya Pembinaan kebudayaan masyarakat wilayah perbatasan.

**VI. Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan 6 program dengan 31 kegiatan pada tahun 2011 untuk meningkatkan potensi pemuda dalam Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan dalam pembangunan serta memperluas kesempatan pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Sumber Dana APBD Provinsi untuk Tahun 2011 mendapatkan anggaran sebesar Rp.62.892.469.700,- dan terrealisasikan sebesar Rp. 35.715.191.249,- dengan capaian kinerja 56,79 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

**a. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

- Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda.
- Pertukaran Pemuda antar Negara.
- Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional
- Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan
- Bimbingan generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Provinsi).
- Kapal Pemuda Nusantara.
- Pembinaan dan Penilaian Pemuda Pelopor.
- Kapal Pemuda Asia.
- Pendidikan dan Pelatihan Pramuka.
- Pembinaan Alumni Program kepemudaan.
- Jenesys.

**b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

- Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat.
- Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi.
- Penyelenggaraan kompetisi olahragat
- Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi.
- Pengembangan olahraga rekreasi.
- Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah.
- Penyelenggaraan olahraga *Multi Event*
- Penyelenggaraan olahraga Tradisional
- Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatih Olahraga.
- Pembinaan Klub Olahraga Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

- Peningkatan Pembangunan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri.
- Pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Olahraga Terpadu Negeri.
- Inventarisasi Barang-barang Acara Olahraga Kaltim.

#### **d. Pengembangan Kewirausahaan dan Industri Olahraga**

- Pelatihan Kewirausahaan dan Industri Olahraga.1
- Koordinasi dan Sinkronisasi Program Strategis Bidang kewirausahaan.
- Ekspo Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga.
- Penyusunan Grand Design Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Kalimantan Timur.
- Pengkajian Potensi Industri Olahraga Kalimantan Timur.

### **VII. Urusan Penanaman Modal**

**Badan Perijinan Penanaman Modal Daerah**, dengan :

#### **1. Program dan Kegiatan**

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 telah melaksanakan 8 program dan 35 kegiatan yang dilaksanakan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Tahun 2011 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 15.205.869.520,- terealisasi Rp 12.946.966.967,- dengan capaian kinerja 85,14 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

##### **a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

- Penyelenggaraan pameran investasi.
- Pengembangan potensi unggulan daerah.
- Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA.
- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.
- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

##### **b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

- Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.



- Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi.
- Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.
- Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
- Kajian kebijakan penanaman modal.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah**

- Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian :

- a. Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan masih terbatas karena belum terbentuknya Tim Teknis.
- b. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten/Kota yang melakukan Promosi secara sendiri, sehingga promosi yang dilakukan belum maksimal, untuk mengatasi masalah ini, BPPMD Provinsi Kalimantan Timur mengevaktifkan kembali Surat Gubernur Kalimantan Timur tentang Penunjukan BPPMD sebagai Koordinator Promosi.
- c. Profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci (FS) sehingga Calon *Investor* tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya, untuk menanggulani masalah ini, untuk yang akan datang meningkatkan alokasi anggaran untuk penyusunan FS yang *comprehenship*.
- d. Bahasa yang digunakan dalam Informasi Potensi Investasi yang disajikan masih menggunakan bahasa terbatas, sehingga kurang komunikatif, untuk mengatasi masalah ini pada tahun mendatang alokasi untuk penyusunan Buku Informasi Potensi lebih ditingkatkan dalam beberapa bahasa.

- e. Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan *Investor* untuk berinvestasi di Kalimantan Timur, untuk menanggulangi permasalahan ini BPPMD Provinsi Kalimantan Timur terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang dan Peruntukan Lahan.

### **VIII. Urusan Wajib Koperasi & UMKM dan Urusan Pilihan Industri, Perdagangan:**

**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM, dengan ;**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur ( termasuk dengan 3 UPTD ), maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebanyak 27 Program dan 86 kegiatan.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan dan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Sumber Dana APBD Provinsi untuk Tahun 2011 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 53.791.084.330- dan terealisasi sebesar Rp. 44.749.445.099,- dengan capaian kinerja 83,19 persen.

#### **Koperasi**

##### **a. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif :**

- Pendirian unit penanganan pengaduan.

##### **b. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah :**

- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
- Memfasilitasi peningkatan Kemitraan usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah.

##### **c. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah :**

- Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
- Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro Kecil Menengah.
- Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.

**d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi :**

- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi
- Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat Perkoperasian

**Perindustrian**

**a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**

- Pengembangan sistem inovasi teknologi industri.
- Penguatan kemampuan industry berbasis teknologi

**b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah :**

- Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
- Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat Jaringan Klaster Industri.
- Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

**c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**

- Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri.

**d. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial :**

- Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat.

**e. Program penataan struktur industri :**

- Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industry

**Perdagangan**

**a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan :**

- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.

**b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional:**

- Koordinasi Pengelolaan isu-isu Perdagangan Internasional.

**c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor :**

- Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.
- Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor Impor.
- Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan Operasional.
- Fasilitasi kemudahan Pengembangan Usaha

- Pengembangan pasar Lelang Daerah.
- Peningkatan kontinuitas pelaporan dan pengolahan data statistik SIUP dan TDP.
- Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor

**d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri :**

- Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.
- Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan.
- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
- Peningkatan kontinuitas pelaporan dan pengolahan data statistik SIUP dan TDP

**3. Permasalahan dan Solusi;**

Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pengembangan struktur ekonomi ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang menimpa negeri ini oleh berbagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembinaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal.

Solusi :

- a. Perlunya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Untuk mengantisipasi ketersediaan stok menyusun prognosa untuk kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis.
- c. Melakukan pemantauan harga setiap hari dan pemantauan stok setiap bulannya.

**IX. Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil, Otonomi Daerah dan Pertanahan ;**

**Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan Umum), dengan:**

**1. Program dan Kegiatan**

Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim pada tahun 2011 telah melaksanakan 7 program dan 16 kegiatan yang merupakan kebijakan Biro pemerintahan Umum Tahun 2011.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim tahun 2011, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.632.299.675,- dan realisasi

anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.879.395.357,- dengan progres 83,75 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

**a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

- Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi kedinasan pejabat negara, PAW, anggota DPRD Prov Kaltim dan Kabupaten/Kota se-Kaltim
- Terselenggaranya Pemilukada Bontang, Kutim, Malinau, Kubar, Balikpapan dan Nunukan

**b. Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah**

- Terwujudnya LPPD dan ILPPD yang optimal
- Penyelenggaraan Tata Usaha Biro yang mendukung kegiatan Biro dengan lancar, tertib dan baik

**c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Terpilihnya Camat terbaik tingkat Provinsi
- Sarana konsolidasi bagi pemprov dan sekaligus mengetahui evaluasi kinerja kecamatan
- Termujudnya aparat teknis yang handal, tanggap dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan profesional sesuai perundang-undangan yang berlaku

**d. Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

- Meningkatnya Kerjasama antar Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam rangka menyamakan persepsi dan memperkuat arus informasi baik secara horisontal maupun vertikal mengenai oTonomi daerah.
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan daerah
- Meningkatnya koordinasi informasi dana Perimbnagan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Adanya penghargaan bagi penyelenggara pemerintahan daerah
- Penyempurnaan Pokok-pokok Program APPSI Periode 2011 – 2015

**e. Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan**

- Meningkatkan fasilitasi dan pengawasan dalam pelaksanaan DKTP
- Terwujudnya pelaksanaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan pertanahan
- Terlaksananya pemeliharaan keamanan dan ketertiban

**f. Program Pembinaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

- Terwujudnya SIAK terkoneksi antar Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Timur

**g. Program Penataan Administrasi Kependudukan**

- Penghargaan kepada Kabupaten/Kota terbaik yang memberikan pelayanan optimal di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta terfasilitasinya penerapan E-KTP.

**3. Permasalahan dan Solusi**

- a. Belum semua pejabat Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri membuat laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur.
- b. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pelaksanaan SIAK dan penilaian bidang kependudukan yang berprestasi, belum terkoneksinya *database* SIAK antara Kabupaten Kota dengan Provinsi serta belum tersedianya server back up *database* SIAK Provinsi.
- c. SKPD terlambat menyampaikan laporan Program/Kegiatan yang dikelola sehingga Penyusunan LPPD Gubernur terhambat.
- d. Terbatasnya dana untuk melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi penerimaan dana perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah dan pendapatan daerah untuk Kabupaten/Kota.
- e. Permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi puluhan tahun yang lalu tanpa bukti pendukung atau hanya berupa fotocopy bukan asli, yang disengketakan masyarakat dari Kabupaten/Kota cenderung lebih banyak dialamatkan kepada pemerintah atau Gubernur karena tidak puas terhadap sikap Pemda setempat.

**Solusi:**

- a. Menyurati Bupati/Walikota serta Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan perjalanan dinas keluar

- Negeri, agar membuat laporan hasil perjalanan dinas keluar negeri.
- b. Diusulkan penambahan anggaran pada tahun 2012 melalui anggaran perubahan.
  - c. Menyampaikan jadwal penyampaian laporan.
  - d. Meminta kepada SKPD yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan Program/Kegiatan agar segera menyelesaikan dan menyampaikannya.
  - e. Diusulkan penambahan anggaran kegiatan koordinasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013.
  - f. Mengadakan rapat-rapat atau memfasilitasi dengan melakukan koordinasi serta konsultasi dan menyurati Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti permasalahan serta mengadakan/melaksanakan sosialisasi sepanjang anggaran tersedia.

#### **X. Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Transmigrasi;**

**Dinas Ketenagakerja & Transmigrasi, dengan :**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Dinas Ketenagakerja & Transmigrasi melalui 6 Program dan 43 kegiatan sebagai pelaksanaan Urusan Wajib Tenaga Kerja (Sub Bidang Ketenagakerjaan).

Berdasarkan Prioritas dan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan (Penurunan Tingkat Pengangguran dan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan).

##### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mendapat sumber dana Tahun Anggaran 2010 terdiri dari APBD Tahun Anggaran 2011 Rp. 58.773.381.660,- terealisasi sebesar Rp. 52.918.033.087,- dengan capaian kinerja 90,04 persen.

##### **Tenaga Kerja**

##### **a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja :**

- Terlaksananya Pelatihan

##### **b. Program peningkatan kesempatan kerja :**

- Tersusunnya bahan informasi tentang kondisi pencari kerja yang akurat

**c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan :**

- Terfasilitasinya hubungan industrial di tingkat Provinsi (60 peserta (100 persen))

**d. Program pengembangan wilayah transmigrasi:**

- Administrasi kegiatan; Studi RSTP; Penyusunan DED Kantor Polisi/Rumah Ibadah/Masjid KTM; Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana di Pemukiman Transmigrasi; Pengadaan Penggiling hasil pertanian; Peningkatan tahap II jalan penghubung Lokasi Tanah Merah; Pengawasan Peningkatan alian Penghubung Tanah Merah; Perbaikan dan Penimbunan Jembatan.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

- a. Sebagian besar perusahaan kurang mematuhi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan sehingga berdampak pada rendahnya kualitas dan produktivitas kerja.
- b. Tidak seimbangnya jumlah pegawai pengawas yang ada dibanding jumlah perusahaan yang diawasi
- c. Kurangnya perhatian perusahaan dalam memberikan pembinaan terhadap pekerja yang bekerja di perusahaan sehingga berpengaruh pada produktivitas kerja.
- d. Belum maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan baik dari segi teknis maupun administrasi.

Solusi :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pada perusahaan-perusahaan yang kurang mematuhi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.
- b. Perlunya penambahan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk memenuhi target pemeriksaan dan pengawasan pada perusahaan di wilayah Kalimantan Timur.
- c. Memberikan himbauan kepada perusahaan-perusahaan agar memberikan pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas bagi pekerjaanya.
- d. Peningkatan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan baik dari segi teknis maupun administrasi.



## **XI. Urusan Wajib Ketahanan Pangan;**

### **Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan, dengan :**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 8 Program Pembangunan Ketahanan Pangan dengan 53 kegiatan sebagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat Total anggaran APBD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 10.369.289.350,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.979.352.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.389.997.350,00, dengan total realisasi sebesar Rp. 9.259.182.963,00 meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.387.115.938,00 (88,10 persen) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.872.067.025,00 (90,39 persen), sehingga persentase total realisasi sebesar 89,29 persen.

#### **3. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum kondisi ketahanan pangan dan penyuluhan di Kalimantan Timur Tahun 2011 cenderung semakin baik dan kondusif, namun kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih belum mencapai standar yang direkomendasikan.

Sedangkan permasalahan lain yang dihadapi dalam upaya melanjutkan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan penanganan keamanan pangan, antara lain :

- a. Produksi dan kapasitas pangan daerah semakin terbatas
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
- c. Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, dan bencana
- d. Hasil analisis ketersediaan belum dimanfaatkan secara maksimal
- e. Pengelolaan cadangan pangan masyarakat belum berkembang secara optimal

- f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan prasarana karena :
  - Semakin maraknya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian
  - Terjadinya kenaikan harga pangan terutama beras, akibat menurunnya stok pangan sebagai akibat dari bencana alam
  - Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat masih rendah, yang dicirikan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi dan seimbang serta aman
  - Masih terjadinya kasus gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai bahan kimia, biologi dan sebagainya.
- g. Sedangkan dalam pengembangan penyuluhan di Kalimantan Timur terjadi dimana Sumberdaya petani yang semakin berkurang dengan usia petani yang semakin tidak produktif. Generasi muda petani yang diharapkan meneruskan usaha pertanian lebih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan batubara atau kelapa sawit yang sedang berkembang pesat saat ini.
- h. Keterbatasan akses terhadap perkembangan teknologi pertanian, modal usaha, sarana parasarana serta informasi pasar.
- i. Kompetensi penyuluh pertanian belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan produksi padi melalui intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi lahan minimal produksi GKP 5 persen per tahun, sehingga tingkat ketahanan pangan (energy) dapat tercapai.
- b. Mempercepat program aksi diversifikasi pangan dan sosialisasi panganekaragaman pangan sehingga ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi secara bertahap melalui pola berimbang, bermutu dan bergizi.
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi ke daerah marginal sehingga dapat meningkatkan percepatan distribusi pangan/akses pangan dengan biaya murah dan mudah.
- d. Melakukan intervensi rawan pangan, percepatan program cadangan pangan wilayah dan percepatan program desa mandiri pangan diperluas disetiap desa, serta melakukan

- koordinasi secara periodik dengan Dolog dalam penanggulangan kerawanan pangan.
- e. Mempercepat program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP), dan penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), sehingga mampu mengurangi kemiskinan dipedesaan dan menyerap tenaga kerja dipedesaan secara optimal.
  - f. Mempercepat revitalisasi Penyuluhan
  - g. Penguatan kelembagaan penyuluhan, melalui program aksi pemberdayaan kelembagaan, yang diikuti dengan pendidikan dan latihan secara berjenjang dan berkala.
  - h. Melakukan pengawasan makanan segar dan olahan secara berkala disentra-sentra produksi dan sentra konsumsi, serta melakukan pengawasan jajanan anak sekolah melalui Programme Food Inspector.

## **XII. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan :**

### **1. Program dan Kegiatan**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penyelenggara urusan wajib melaksanakan 7 Program dan 16 Kegiatan pada tahun 2011 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kaltim pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kaltim pada tahun 2011 mendapat total anggaran sebesar Rp. 11.975.182.960 terdiri dari Rp. 7.883.959.960,- (BL) dan 3.548.223.000 (BTL) dan setelah mengalami revisi-revisi termasuk mendapatkan tambahan melalui APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp.8.426.959.960 ,- (BL) Atau mengalami kenaikan Rp. 543.000.000 (BL) Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 9.766.198.344 Atau sebesar 81,55 persen.

#### **a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan :**

- Seminar Peran Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan keluarga dalam Rangka Hari Ibu (1 paket (100 persen)) Penilaian desa/kelurahan/kecamatan

terbaik P2WKSS/RSSI/GSI/KSI Perusahaan Pembina Terbaik naker perempuan (1 paket (100 persen)), Advokasi dan fasilitasi pembentukan Desa Prima di Kaltim (3 Paket); Semiloka Kota Layak Anak dan Sosialisasi TESA (1 paket); Lokakarya Anak berkebutuhan khusus (1 paket); Sosialisasi tentang Hak Hak Perempuan.

**b. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan :**

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

**c. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak :**

- Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
- Pengembangan Sistem Informasi gender dan anak
- Advokasi dan fasilitasi PUG

**d. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan :**

- Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.

**e. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri:**

- Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

**3. Permasalahan dan Solusi**

- Badan PP dan KB merupakan badan yang baru dibentuk, sehingga masih perlu diadakan pembenahan baik sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor.
- Kurangnya staf/pegawai non struktural yang hanya berjumlah 18 orang untuk tahun 2011 dengan jumlah pejabat struktural 14 orang sehingga ada beberapa pejabat eselon IV yang tidak mempunyai staf.
- Masih ada sebagian kegiatan yang sepertinya agak tumpang tindih dengan lembaga lain seperti pada bidang KB-KS dengan instansi vertikal seperti BKKBN.

### **XIII. Urusan Wajib Perhubungan**

**Dinas Perhubungan**, dengan :

#### **1. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 11 program dan 54 kegiatan pembangunan Bidang Perhubungan.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur jumlah anggaran sebesar Rp. 386.757.880.240,- teralisasi sebesar Rp. 204.777.222.974,- (52,95 persen).

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

##### **a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

- Terlaksananya Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan sebanyak 1 paket di Kab. Bulungan
- Tersusunnya kebijakan, norma, satandar dan prosedur bidang perhubungan (penyusunan Perda)
- Terlaksananya koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan di Kota Tarakan
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan udara pada ruang VIP Temindung

##### **b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

- Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas LLAJ

##### **c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

- Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi supir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang di 14 Kabupaten/Kota
- Terlaksananya kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
- Terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- Terlaksananya pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.

**d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

**e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

- Pembangunan Bandara Juwata Tarakan.
- Pembangunan Bandara Kalimantan dan Maratua.
- Pembangunan Bandara Samarinda Baru.
- Peningkatan Pelabuhan Laut PLBL Lamijung Kab. Nunukan.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana SDP.
- Pembangunan Terminal Petikemas Kariangau.
- Peningkatan Bandara Dauh Dawai dan Bandara Long Apari.
- Pembangunan Bandara Long Apung Kab. Malinau.
- Pembangunan Bandara Long Bawan Kab. Nunukan.

**f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
- Pengadaan Marka Jalan.
- Pengadaan pagar pengaman jalan.

**XIV. Urusan Komunikasi dan Informatika**

**a. Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika tahun 2011 sebanyak 14 program dan 40 kegiatan :

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 melalui APBD Provinsi Kaltim mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp 18.716.822.400,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah). Adapun realisasi anggaran yang dialokasikan melalui dana APBD Provinsi Kaltim tanggal 31 Desember 2011, program/kegiatan yang dilaksanakan adalah realisasi fisik sebesar 94,32 persen dan realisasi keuangan sebesar 80,84 persen, dengan realisasi keuangan sejumlah Rp. 15.130.384.913,-.

**a. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa:**

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, berupa pengembangan jaringan IT di 14 Kabupaten/Kota.

**b. Program peningkatan/pengembangan aparatur di bidang telematika:**

- Sosialisasi / Seminar dan Penilaian Pegy dalam Rangka Peningkatan E Govt berupa Sosialisasi yang diikuti oleh 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

**c. Program perencanaan pembangunan informasi dan komunikasi:**

- Operasional pelaksanaan e-Gov sekretariat e-Proc berupa Sosialisasi dan pelatihan kepada SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi sebanyak 54 SKPD.

**d. Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika:**

- Pengembangan/Pembenahan/Aplikasi Website SKPD di Prov. Kaltim berupa pengembangan website 54 SKPD Provinsi Kaltim.

**e. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi:**

- Pembinaan Standarisasi Aplikasi/Software Legal berupa pembinaan software legal di 14 Kabupaten/Kota.

**f. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Koinfo:**

- Pembinaan/Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim berupa sosialisasi terhadap penyelenggara jasa titipan di 3 Kabupaten/Kota.

**3. Permasalahan dan Solusi**

- a. Belum optimalnya penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan dan mekanisme pelayanan publik sampai pada tingkat Kabupaten dan Kota, dikarenakan beberapa daerah belum berdiri SKPD yang secara khusus menangani bidang komunikasi dan Informasi
- b. Adanya kewenangan Pemerintah Provinsi yang ditarik kembali ke Pemerintah Pusat setelah terbitnya PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, sehingga mengakibatkan terjadi perubahan mendasar pada perumpungan urusan yang ditangani oleh OPD baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diwadahi dalam suatu SKPD berbentuk dinas atau UPTD.

- c. Kurang optimalnya penataan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- d. Kurang optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kaltim
- e. Beberapa program dan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Kaltim Tahun 2011 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan ada beberapa program/kegiatan yang dananya diusulkan pada waktu anggaran perubahan (APBD-P) 2011 yang mana waktu pelaksanaannya relatif terbatas.
- f. Selain itu tenaga staf pelaksana yang ada pada Dinas Kominfo masih terbatas seperti : Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikasi, Panitia Pemeriksa Barang, dan Pembuat Dokumen serta staf tenaga teknis yang berstatus PNS. Keterbatasan tenaga pelaksana yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.
- g. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai, yang secara bertahap tiap tahunnya akan terus dilengkapi dengan mengajukan usulan anggaran APBD.

**b. Sekretariat KPID**

**1. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika periode 2009 – 2013 sebanyak 14 program dan 40 kegiatan :

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Tahun Anggaran 2011 melalui APBD Provinsi Kaltim

**3. Permasalahan dan Solusi**

- a. Belum optimalnya penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan dan mekanisme pelayanan publik sampai pada tingkat Kabupaten dan Kota, dikarenakan



- beberapa daerah belum berdiri SKPD yang secara khusus menangani bidang komunikasi dan Informasi
- b. Adanya kewenangan Pemerintah Provinsi yang ditarik kembali ke Pemerintah Pusat setelah terbitnya PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga mengakibatkan terjadi perubahan mendasar pada perumpunan urusan yang ditangani oleh OPD baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diwadahi dalam suatu SKPD berbentuk dinas atau UPTD.
  - c. Kurang optimalnya penataan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
  - d. Kurang optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kaltim

## **XV. Urusan Kesbang dan Politik Dalam Negeri,**

### **a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan :**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan sekumpulan kegiatan sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan sinergi pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 9 program dan 37 kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 16.621.844.760,- dan raealisasi Rp. 12.401.127.548,- dengan capaian kinerja 74,60 persen.

##### **a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan :**

- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di daerah perbatasan.

- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan :**
  - Pembauran bagi generasi muda, pelajar, dan pramuka
- c. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) :**
  - Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
  - Deteksi dini / kewaspadaan dini
- d. Program pendidikan politik masyarakat :**
  - Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat
  - Fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada
  - Fasilitasi / penelitian berkas bantuan partai politik
- e. Program ketahanan sosial ekonomi :**
  - Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga
  - Sosialisasi undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi
  - Pengawasan peredaran uang palsu
- f. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal :**
  - Pengawasan periodik kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan trantibun
- g. Program pembinaan, fasilitasi, perencanaan, penyusunan anggaran, evaluasi dan pelaporan :**
  - Penyusunan profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- h. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan :**
  - Operasional pengaturan penjagaan pengawalan dan patrol (turjawali).
  - Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.
- i. Program tanggap darurat penanggulangan bencana**
  - Sosialisasi bidang kedaruratan & logistik pada 3 Kabupaten/Kota
- j. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan Bencana daerah :**
  - Penyusunan rencana standar rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana
- k. Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah :**
  - Fasilitasi perencanaan penanggulangan bencana

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 dapat berjalan dengan lancar namun ada beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, disebabkan Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak difungsikan lagi berdasarkan Surat Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlambat dilaksanakan disebabkan kurangnya pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang akan diangkat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Pembuatan pelaporan kinerja SKPD terlambat disebabkan kurangnya SDM yang memiliki keterampilan serta masih rendahnya disiplin sebagian pegawai dalam melaksanakan tupoksi.

Solusi:

Sebagai solusi dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2011, maka langkah-langkah yang ditempuh antara lain :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak diprogramkan lagi di Tahun 2011.
- b. Mengikutsertakan pegawai dalam Diklat dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa.
- c. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dengan memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai PP Nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS dan mengikutsertakan pegawai dalam Bimtek, Diklat serta mengoptimalkan fungsi monitoring.

#### **b. Satuan Polisi Pamong Praja, dengan :**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2011 menetapkan 7 program dan 40 kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan Pemerintah Daerah dan merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan yang nyata, program dan kegiatan merupakan

penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011, yaitu sebesar Rp. 7.384.501.000,- dan realisasi Rp. 4.833.426.135,- dengan capaian kinerja 65,45 persen.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

Perkembangan Realisasi fisik dan realisasi keuangan program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 secara keseluruhan telah mencapai keuangan sebesar Rp. 3.987.046.126,- ( 73.32 persen ) fisik 73.32 persen dari alokasi dana sebesar Rp. 14.941.556.000,- yang menurut target sampai dengan 31 Desember 2011 harus mencapai target 100 persen hal ini disebabkan :

- a. Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat kendala yang sangat serius perlu diatasi segera yaitu permasalahan sumber daya aparatur yang keberadaan baik kuantitas maupun kualitas memang sangat terbatas yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga dalam perjalanannya kepanitiaan pengadaan barang dan jasa tersebut terpaksa menggunakan tenaga dari luar SKPD Satpol PP,
- b. Program dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yang seharusnya ditempatkan pada belanja modal tetapi program kegiatan tersebut dalam DPA terletak pada Belanja Barang dan Jasa ( salah penempatan)
- c. Uang Persediaan yang kurang dari aliran Kas baik Triwulan maupun bulanan sehingga akan sulit dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya paket, hal ini akan berakibat tertundanya kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya.
- d. Dari hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur 2011 di atas maka disarankan :
- e. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan profesionalisme bagi aparatur Satpol PP Provinsi Kaltim dibidang pengelolaan keuangan
- f. Peningkatan kualitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan melalui diklat-diklat, ujian sertifikasi, seminar/ work Shop yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- g. Penyediaan uang persediaan hendaknya dapat dipenuhi sesuai dengan aliran Kas baik Triwulan maupun bulanan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya paket.

**c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2011 menetapkan 10 program dan 34 kegiatan untuk mencapai tujuan kebijakan Pemerintah Daerah dan merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan yang nyata, program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dengan dibentuknya APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Tahun Anggaran 2011 mendapat Pagu Anggaran Belanja Langsung APBD (Januari s.d Desember 2011) pada APBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 7.174.686.700,- dan dapat terealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 6.562.720.462, capaian kinerja 85,65 persen.

**XVI. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian,**

**a. Biro Humas dan Protokol, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Biro Humas dan Protokol pada tahun 2011 telah melaksanakan 6 program dan 19 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011, dengan total anggaran sebesar Rp. 14.045.025.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 13.100.676.149 dengan progres 93,28 persen.

**b. Biro Sosial, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Biro Sosial pada tahun 2011 telah melaksanakan 1 program dan 5 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011.

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011, dengan total anggaran sebesar Rp.7.639.136.480,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.6.451.633.999,- dengan progres 84,46 persen.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan:

- a. Terjadinya keterlambatan Uang Panjar (UP) Kegiatan yang baru dapat terealisasi pada triwulan kedua sehingga mengakibatkan kegiatan-kegiatan pada Biro Sosial menumpuk pada triwulan ketiga dan ke empat, terjadinya kekosongan kegiatan pada triwulan kesatu sampai kedua, dan juga menghambat proses bansos dan hibah.
- b. Belum adanya sistem yang terprogram dalam penyusunan *database* penerima bantuan dan hibah.
- c. Alokasi anggaran bantuan sosial dan hibah pada APBD-P setiap tahunnya penerima bantuan tersebar di Kabupaten/Kota Se Kaltim sementara batas waktu pencairan yang sangat pendek.

Solusi :

- a. Sebaiknya Uang Panjar (UP) Kegiatan segera direalisasikan pada triwulan pertama sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada triwulan pertama dan tidak menumpuknya kegiatan-kegiatan.
- b. Adanya sistem yang terprogram dalam penyusunan *database* penerima bantuan dan hibah.
- c. Diharapkan alokasi bantuan Sosial dan hibah pada APBD-P setiap tahunnya di harapkan penerima bantuan tidak dalam jumlah besar dan akses penerima bantuan terjangkau dan mudah dalam mengurus administrasi pencairan sehingga waktu yang dimiliki oleh Biro Sosial panjang.

### **c. Biro Umum, dengan :**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 7 program dan 27 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011.

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.39.489.494.688,- dengan progres 81,22 persen.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih dijumpai kelemahan dan permasalahan yang harus ditekan serendah mungkin, yaitu antara lain :

- a. Belum efektifnya system dan mekanisme koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran di lapangan.
- b. Banyaknya kegiatan dan acara yang tidak terjadwal dan sulit untuk diprediksi.
- c. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kegiatan / acara Pemerintah Daerah.
- d. Distribusi SDM belum sesuai kompetensi pada masing-masing bidang.
- e. Tidak adanya pos anggaran yang dapat mengakomodir keperluan Pimpinan Daerah yang sifatnya mendadak.

### **Solusi**

Peningkatan system mekanisme pelaksanaan perencanaan anggaran dapat mengakomodir keperluan bersifat urgen.

- a. Peningkatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
- b. Peningkatan koordinasi kegiatan/ acara yang tidak terjadwal dengan instansi terkait.
- c. Optimialisasi realisasi sesuai target capaian yang telah ditetapkan.

## **d. Biro Organisasi, dengan :**

### **1. Program dan Kegiatan**

Program Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 adalah sebanyak 5 (lima) program dengan 25 kegiatan yang ada dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Biro Organisasi mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp. 3.678.061.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.459.912.250,- atau sebesar 94,07 persen. Secara persentase anggaran memang terlihat serapan dana



yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

Dalam rangka melaksanakan tugas penataan organisasi, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerja instansi selama tahun anggaran 2011 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Kurang optimalnya penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik dan mekanisme prosedur kerja.
- b. Kurangnya kualitas manajemen pelayanan publik
- c. Terbitnya PP No. 38 Thn. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mengakibatkan terjadi perubahan mendasar pada perumpunan urusan yang ditangani oleh OPD baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang diwadahi dalam suatu SKPD berbetuk Dinas atau LTD.
- d. Kurang sinkronnya kondisi real kelembagaan OPD Pemerintah Prov.Kaltim yang ada dengan terbitnya PP No. 41 Thn. 2007.
- e. Kurang optimalnya penataan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Prov.Kaltim.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan analisis jabatan di Kabupaten/Kota se Kaltim.
- g. Kurang optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kaltim.
- h. Belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Setda Prov.Kaltim.

#### **Solusi**

Dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik dan mekanisme prosedur kerja perlu adanya kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan (Penerapan nilai-nilai budaya kerja dilingkugan Pemprov.Kaltim).
- b. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik, perlunya kegiatan :
- c. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.



- d. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dan kompetisi Antar Daerah.
- e. Pengembangan Budaya kerja.
- f. Penetapan SPM.
- g. Konsultasi teknis tentang Ketatalaksanaan.

**e. Biro Pembangunan Daerah, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2011 Biro Pembangunan Daerah telah melaksanakan 3 program dan 5 kegiatan

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Biro Pembangunan Daerah mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp. 6.756.409.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.886.455.441,- atau sebesar 87,12 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam rangka melaksanakan tugas Pembinaan dan Pengendalian pembangunan, peningkatan sumber daya aparatur dan akuntabilitas kinerja instansi selama tahun anggaran 2011 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Ketersediaan dana yang kurang memadai untuk menunjang tupoksi;
- b. Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten/Kota dikarenakan pengendalian dan evaluasi dilapangan tidak maksimal disebabkan alokasi anggaran yang terbatas.
- c. Kurang memadainya ruang LPSE, hanya tersedia untuk ruang administrasi dan ruang verifikasi, belum tersedia ruang bidding (tempat penyedia barang/jasa memasukkan penawaran) dan ruang pelatihan termasuk untuk menerima tamu dalam rangka bimbingan teknis sehingga menjadi kendala untuk memfasilitasi lebih baik lagi terhadap pengguna LPSE;

- d. Perangkat jaringan internet pendukung LPSE berupa bandwidth yang terpasang baru 4 Mb (sewa per tahun). Sekurang-kurangnya untuk memberikan layanan yang lebih baik bandwidth yang terpasang 10 Mb agar dapat diakses oleh pengguna yang sulit terjangkau jaringan LPSE Kaltim. Oleh karena itu perlu peningkatan kapasitas bandwidth sekurang-kurangnya sebesar 10 Mb pertahun. Alokasi anggaran yang diperlukan sebesar Rp 1 Milyar.

**f. Biro Perekonomian, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2011 Biro Ekonomi telah melaksanakan 3 program dan 9 kegiatan.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Biro Perekonomian mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp. 2.994.547.000- dengan realisasi sebesar Rp. atau sebesar 87,12 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Percepatan pembangunan pada bidang ekonomi, akan berdampak pada perubahan lingkungan yang signifikan, oleh karenanya diperlukan fasilitasi dan sinergi terhadap setiap kegiatan pembangunan di daerah Kaltim. Usaha untuk mewujudkan pelayanan public secara prima diperlukan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan bertanggungjawab sebagai unsure aparatur Negara dan abdi masyarakat, sehingga tugas pemerintah dan pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dan optimal yang tanggap terhadap perubahan lingkungan dan berpandangan kedepan.

**g. Biro Hukum, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program

yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2011 Biro Hukum telah melaksanakan 10 program dan 24 kegiatan:

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Biro Hukum mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp. 4.144.827.232- dengan realisasi sebesar Rp. 4.051.354.598,-atau sebesar 97,74 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam rangka melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hokum dan hak asasi manusia, pembinaan dan pengawasan produk hokum, dokumentasi dan informasi hukum selama tahun anggaran 2011 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Kurang tersedianya sarana teknologi informasi dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Belum tersedianya kendaraan operasional lapangan;
- c. Koordinasi untuk mencari bukti/surat tertulis dengan instansi/tergugat untuk dijadikan bahan pembuktian dalam persidangan di pengadilan, sering terkendala karena bukti sudah tidak ada/hilang.
- d. Perda dan peraturan Bupati/Walikota masih belum sepenuhnya disampaikan ke Biro Hukum Setda Prov Kaltim ;
- e. Masih ada Kabupaten yang belum memenuhi pembuatan Peraturan Daerah dalam rangka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sampai dengan Bulan Januari 2011;
- f. Masih kurangnya personil yang memahami teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- g. Kurangnya Perhatian SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mendukung program legislasi daerah (Prolegda) dengan menyampaikan Raperda kepada Biro Hukum;
- h. Sering berubah-ubahnya susunan personil panitia/tim yang dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur,

sehingga proses penetapan Keputusan Gubernur menjadi relatif lama.

Solusi :

- a. Dalam pemberian dokumentasi dan informasi hukum, untuk sementara masih menggunakan sarana yang tersedia.
  - b. Dalam melaksanakan operasional Biro Hukum untuk sementara masih menggunakan kendaraan dinas Kepala Biro/Kabag dan kendaraan pribadi.
  - c. Dalam persidangan di pengadilan, bukti tidak disertakan.
  - d. Sudah disampaikan Surat edaran Gubernur kepada seluruh Bupati/Walikota agar menyampaikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah ke Pemerintah Provinsi untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Sudah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh SKPD agar menyampaikan prolegda setiap tahun terutama Raperda kepada Biro Hukum untuk dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur setiap tahun.
  - f. Sudah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh SKPD agar menyampaikan penyusunan personil tim/panitia pada keputusan Gubernur tidak berubah-ubah.
  - g. Dalam mempercepat proses pelaksanaan evaluasi Biro hukum melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung.
  - h. Dalam mempercepat proses pembahasan Biro Hukum melakukan komunikasi dan kordinasi secara langsung.
  - i. Diadakan setiap tahun Rakor Biro Hukum se Kaltim.
  - j. Masih perlu diadakan bimtek setiap tahun untuk Kabupaten/Kota se Kaltim
  - k. Memaksimalkan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan produk Hukum daerah Kabupaten/Kota.
- h. Biro Perlengkapan, dengan :**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2011 Biro

Perlengkapan telah melaksanakan 7 program dan 36 kegiatan

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Biro Perlengkapan mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp. 123.648.975.000- dengan realisasi sebesar Rp. 53.098.744.281,-atau sebesar persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang kurang optimal, namun tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen dan ini berarti terjadi efisiensi atas penggunaan dana tersebut.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

- a. Kegiatan Peningkatan Sarana Mobilitas dan Administrasi Pemerintah Provinsi Kaltim DPA terlambat disahkan dan diterbitkan.
- b. Kegiatan Pengadaan tanah , persertifikatan dan pengamanan Aset Milik Pemprov Kaltim masih mengalami Kendala.
- c. Kegiatan Rehab Penyempurnaan Fisik Pemerintah Pemprov Kaltim menghadapi kendala.
- d. Kegiatan Penilaian Penghapusan dan Penjualan menghadapi kendala
- e. Perencanaan yang tidak sinkron tidak sesuai dengan usulan.
- f. Terjadinya perubahan /usulan baru yang tidak sesuai dengan DPA.

Solusi:

- a. Sebagian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dirasionalisasikan dan diusulkan kembali pada tahun berikutnya.
- b. Perencanaan yang tidak sesuai dengan usulan diambil langkah-langkah sebagai berikut:
- c. Telah dilakukan revisi kegiatan.
- d. Disetorkan ke kas daerah
- e. Dalam penyelesaian pembebasan Lahan dan persertifikatan tanah, agar dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan panitia Pembebasan Tanah.
- f. Bagi masyarakat yang lahan/tanahnya akan diganti rugi supaya melengkapi surat-surat tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**i. Biro Keuangan, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Kebijakan-kebijakan atas program yang telah direncanakan akan dijabarkan secara operasional dalam bentuk beberapa kegiatan, Pada tahun 2011 Biro Keuangan telah melaksanakan 2 program dan 22 kegiatan.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Biro Keuangan mendapat alokasi dana anggaran sebesar Rp.2.697.845.184.600- dengan realisasi sebesar Rp. 2.549.098.179.270.448,-atau sebesar 94 persen. Secara persentasi anggaran memang terlihat serapan dana yang sudah optimal, tingkat capaian kinerja rata-rata 100 persen.

**3. Permasalahan dan Solusi**

- a. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain
- b. Belum maksimalnya system pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penyusunan anggaran sampai pada pelaporan.
- c. Masalah regulasi pengelolaan keuangan yang berubah-ubah.
- d. Belum maksimalnya penempatan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan tupoksinya.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Biro dan Instansi lain.
- b. Meningkatkan pengelolaan system
- c. Meningkatkan sumber daya manusia melalui diklat serta pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**j. Biro Kerjasama & Penataan Wilayah**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk realisasi anggaran tahun 2011, umumnya dapat terserap lebih, lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Pada Program ini telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai melalui : Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Pada Program ini telah ditetapkan target kinerja yang akan dicapai melalui :

- a. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Kegiatan ini dengan.
- b. Kegiatan Proses Pembentukan/Pemekaran Wilayah.
- c. Kegiatan Inventarisasi dan Penamaan Pulau-Pulau Yang Belum Bernama di Kalimantan Timur.
- d. Kegiatan Inventarisasi dan Penomoran Kode Serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.589.185.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 4.014.696.154 dengan progres 87,48 persen.

## **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama masih dihadapi beberapa permasalahan, dan isu yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 dan seterusnya adalah sebagai berikut :

### **Perbatasan**

Dalam bagian perbatasan, penyelenggaraan mediasi konflik dan penegasan batas, serta fungsi lain dalam pelaksanaannya masih dihadap beberapa permasalahan dan isu sebagai berikut :

- a. Masih terjadinya sengketa batas hamper disemua daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
- b. Terjadinya perebutan Sumber Daya Alam di beberapa daerah Batas antar Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
- c. Ketidak pastian hak penduduk dalam pendaftaran Pemilu kada;
- d. Ketidak jelasan kewenangan pengeluaran ijin pengelolaan SDA, Surat Keterangan, dan Bukti Hak Atas Tanah di Daerah Batas Antar Daerah;
- e. Terjadinya overlapping pengaturan Tata Ruang Daerah;
- f. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya;

- g. Sikap sebagian masyarakat yang lebih mengutamakan eksploitasi SDA daripada batas administrasi;
- h. Kondisi geografis Kaltim yang bergelombang, bergunung dan berbukit terjal sehingga menyulitkan dalam pelacakan;

#### Penataan Wilayah

Pelaksanaan Program dan kegiatan penataan wilayah dihadapi permasalahan dan isu sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan pemekaran wilayah
- b. Tingginya aspirasi politik banyak kurang didukung oleh aspek teknis, ekonomis dan aspek lainnya;
- c. Kebanyakan penataan wilayah masih diterjemahkan pada pemekaran dan penggabungan wilayah, sehingga hal-hal substansial lainnya masih banyak terabaikan;
- d. Kebanyakan daerah-daerah yang dimekarkan menimbulkan masalah batas daerah;

#### Kerjasama

- a. Penanganan kerjasama masih tersebar, dan terdapat hampir disemua Dinas/lembaga sehingga sulit di koordinasikan dan diketahui tingkat perkembangannya;
- b. Kajian Kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat, sering kurang didukung oleh informasi dan data yang memadai, akibatnya banyak kesepakatan yang dibuat sulit terealisasi dengan baik;
- c. Beberapa kesepakatan yang disetujui, sulit ditindak lanjuti, karena minimnya dukungan pembiayaan, SDM dan sumber-sumber lainnya;
- d. Kesepakatan Pemerintah dan Pihak lain yang ditindak lanjuti oleh swasta, sering kurang melibatkan swasta yang bersangkutan baik tahap perencanaan, dan proses negosiasi;
- e. Dalam beberapa kesepakatan pembangunan infrastruktur, dan sarana keberadaan dukungan lahan cenderung belum siap;
- f. Ajakan kerjasama cenderung diinisiatif oleh pihak lainnya, sedangkan pemerintah kurang mengkaji manfaat secara seksama dari kesepakatan yang dibuat, dan ditanda tangani bersama kesepakatan tersebut Pemerintah Provinsi kurang mendapatkan keuntungan yang optimal;



**k. Sekretariat DPRD Provinsi, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 11 program dan 31 kegiatan yang merupakan kebijakan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dilihat dari total anggaran secara keseluruhan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011, dengan total anggaran sebesar Rp. 160.478.461.000,- dan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 137.005.945.528 dengan progres 84,33 persen.

**l. Dinas Pendapatan Daerah, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

**Program pelayanan administrasi perkantoran.**

Tujuan program untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- h. Penyediaan alat tulis kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- j. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- l. Penyediaan makanan dan minuman
- m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- n. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
- o. Penyediaan jasa pegawai non PNS

**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**

Tujuan program untuk meningkatkan jumlah gedung dan prasarana penunjang kantor.

Kegiatan :

- a. Pembangunan rumah dinas
- b. Pembangunan gedung kantor
- c. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- d. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
- e. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- f. Pengadaan peralatan gedung kantor
- g. Pengadaan mebelair
- h. Pengadaan tanah
- i. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- j. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
- k. Rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan

**Program peningkatan disiplin aparatur.**

Tujuan program untuk meningkatkan disiplin pegawai.

Kegiatan :

- a. Pengadaan mesin absensi/kartu absensi
- b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

**Program peningkatan kapasitas sumber daya.**

Tujuan program untuk meningkatkan wawasan dan kapasitas sumber daya pegawai.

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian.**

Tujuan program untuk menciptakan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik.

Kegiatan :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan.**

Tujuan program untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Kegiatan :

- a. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No.	Instansi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Dispenda Prov.Kaltim	113,642,241,995.00	90,080,523,081.00	79.27
2.	UPTD Samarinda	5,810,115,000.00	4,816,828,420.00	82.90
3.	UPTD Balikpapan	8,930,127,780.00	6,278,679,600.00	70.31
4.	UPTD Kutai Kartanegara	7,334,655,000.00	5,086,813,804.00	69.35
5.	UPTD Kutai Timur	2,921,915,000.00	2,113,405,267.00	72.33
6.	UPTD Kutai Barat	9,010,765,000.00	7,676,770,064.44	85.20
7.	UPTD Bontang	2,252,136,000.00	1,812,164,301.00	80.46
8.	UPTD Pasir	5,441,809,000.00	4,226,264,496.00	77.66
9.	UPTD Penajam PU	2,068,156,600.00	1,275,142,876.00	61.66
10.	UPTD Berau	4,942,785,000.00	3,311,601,691.00	67.00
11.	UPTD Tarakan	4,062,939,700.00	3,052,587,666.00	75.13
12.	UPTD Bulungan	4,181,023,750.00	3,580,323,072.00	85.63
13.	UPTD Nunukan	2,372,619,000.00	2,209,849,984.00	93.14
14.	UPTD Malinau	1,706,425,250.00	1,435,191,362.00	84.11
15.	UPTD Tana Tidung	1,508,321,150.00	1,382,712,830.00	91.67
<b>JUMLAH</b>		<b>176,186,035,225.00</b>	<b>138,338,858,514.44</b>	<b>78.52</b>

### 3. Permasalahan dan Solusi

Sebagai upaya Optimalisasi PAD bersama ini disampaikan beberapa permasalahan (Bottel Neck) dibidang Penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut:

#### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**

- a. Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004, tarif pajak PBB-KB ini adalah sebesar 5 persen dari nilai jual Bahan Bakar Kendaraan, namun dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/98/SJ tentang Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tertanggal 14 Januari 2010, maka penyusunan tarif 5 persen ini tidak diterapkan sepenuhnya 100 persen dan bervariasi untuk masing-masing sektor usaha :
  - Sektor Transportasi / umum dikenakan penuh : 100 persen dari tarif 5 persen
  - Sektor kehutanan diterapkan sebesar 90 persen dari tarif 5 persen
  - Sedangkan sektor Industri Kontraktor diterapkan hanya 17,17 persen dari tarif 5 persen
- b. Dengan adanya perbedaan tarif yang sangat lebar antara tarif sektor Industri (17,17 persen) dan sektor Pertambangan, Kehutanan dan perkebunan (90 persen) membuat peluang manipulasi penjualan Bahan Bakar dilapangan oleh para penjual/ penyalur dilapangan dimana penjualan kepada pemakai (end User) sektor pertambangan, kontraktor dijual dengan harga sektor industri.
- c. Hal ini bisa terjadi mengingat karena saat ini Pertamina tidak lagi memegang monopoli penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), tapi ada pesaing lain seperti dari Shell, Petronas, AKR, BAPP dan lainnya sehingga terjadi

- perang harga dilapangan untuk mendapatkan pembeli (Buys) yang sebanyak-banyaknya.
- d. Indikasi kearah ini bisa terpantau dari agen yang membeli ke Pertamina dengan harga Industri, sedangkan penjualannya ke pemakai (end user) rata-rata dari sektor Pertambangan.
  - e. Pada kondisi perekonomian Kaltim sektor Pertambangan lebih dominan dari pada sektor Industri sangat berbeda dengan daerah Jawa yang sektor Industrinya lebih dominan dari sektor Pertambangan sehingga kemungkinan manipulasi pajaknya kecil.

#### **Perkiraan Kerugian**

- a. Selisih tarif antara sektor Industri (17,17 persen) dengan Pertambangan (90 persen) adalah 5,24 kali lipat
- b. Bila separoh saja dari penjualan/ pengeluaran bahan bakar, melakukan manipulasi tarif maka akan terjadi kerugian Pemprov. Kaltim sebesar Rp. 812,50 M
- c. Sampai saat ini penerimaan PBB-KB baru mencapai Rp. 750 M
- d. Upaya pengawasan baik pada Pertamina maupun non Pertamina apalagi pada tingkat agen dilapangan cukup sulit dan banyak menemui kendala.

#### **Pajak Alat Berat**

Masih rendahnya wajib pajak alat berat untuk membayar pajaknya khususnya perwakilan dari Kuasa Pertambangan

Solusi:

- a. Perlu adanya peninjauan ulang terhadap Surat Edaran Mendagri agar perbedaan tarif antar sektor tidak terlalu lebar sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan.
- b. Terhadap pemberian keringanan tarif seperti ini, seyogyanya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan berapa keringanan pajak yang diberikan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing daerah.
- c. Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang baru, UU No. 28 tahun 2009, lebih memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan Tarif Pajak yaitu menetapkan tarif Pajak PKB, BBN-KB dapat dijadikan rujukan.
- d. Perlu adanya pemeriksaan secara reguler oleh team OPD (Optimalisasi Pendapatan Daerah) terhadap

- Pertamina dan Non Pertamina dalam bentuk rekonsiliasi data guna memantau pergerakan penjualan dilapangan.
- e. Pemeriksaan dan Pendataan dapat juga dilaksanakan secara reguler bersama BP-Migas pusat.
  - f. Pemerintah Daerah juga perlu memiliki data pembanding, untuk itu perlu dilakukan kegiatan survey ke beberapa perusahaan tambang besar (PKB2B) di Kalimantan Timur.
  - g. Perlu segera disusun jadwal acara dan team yang solid dengan melibatkan Instansi terkait.
  - h. Agar penerimaan pajak kendaraan alat berat masuk ke mekanisme Samsat.
  - i. Mengintensifkan pungutan Pajak Alat Berat khususnya Kuasa Pertambangan dengan melibatkan Pemkab/Pemkot setempat.

**m. Badan Penelitian Pembangunan Daerah, dengan :**

**1. Program dan kegiatan :**

Kebijakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam PROPEDA dan RENSTRA Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya merupakan dasar rujukan utama dalam penyusunan RENSTRA BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013. Program-program yang dilaksanakan oleh Balitbangda terdiri dari 8 program dan 25 kegiatan.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 telah dianggarkan dana sebesar Rp. 19.420.761.530,- yang dibagi ke dalam 2 (dua) jenis anggaran, yaitu :

- a. Anggaran Tak Langsung sebesar Rp. 9.940.627.000,- yang lebih terkonsentrasi kepada pembiayaan rutin yang bersifat pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai BALITBANGDA Prov. Kaltim. Proses penggunaan anggaran Tak Langsung pada umumnya sudah berjalan sebagaimana jadwal yang direncanakan, hal ini mengakibatkan realisasi penggunaan dana tidak mendapat kendala atau diasumsikan dalam realisasi fisik 100 persen dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.583.240.667, - atau 86,35 persen. Dengan demikian anggaran tak langsung mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.357.386.333,- ini karena dipersiapkan untuk mengantisipasi penambahan pegawai, kenaikan

gaji berkala, kenaikan pangkat dan penyesuaian gaji (Infasing).

- b. Anggaran Langsung sebesar Rp. 9.480.137.530,-. yang membiayai 8 (delapan) program utama Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2011, sampai dengan Desember 2011 realisasi fisik 100 persen, keuangan : teralokasi Rp.9.480.137.530,- realisas Rp. 8.332.372.224,- atau 87.89 persen. Dengan demikian anggaran langsung mempunyai sisa anggaran sebesar Rp. 1.147.762.306,- yang merupakan sisa anggaran dari penghematan dan efesiensi

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa produk Keluaran Balitbangda sudah dihasilkan dan sudah disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Harapan akan adanya perubahan sebagai dampak langsung dari input hasil litbang untuk penetapan kebijakan yang berlandaskan hasil penelitian masih perlu diupayakan lebih intensif lagi. Budaya akademis dan analitis dalam penetapan kebijakan , perencanaan belumlah seperti apa diamanatkan oleh Visi Litbang dimana seluruh kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan umum seharusnya didasarkan atas pertimbangan data yang akurat dan benar. Hal itu hanya dapat dilakukan bilamana hasil penelitian dijadikan rujukan utama, sebagai pertimbangan penetapan kebijakan. Dalam usianya yang baru mencapai 11 (sebelas) tahun Balitbangda Prov Kaltim masih memiliki beberapa permasalahan / kendala :

#### **Kendala Jejaring Kerja**

Jejaring kerja antar lembaga litbang di Kaltim belum efektif, baik itu sesama litbang daerah maupun dengan litbang yang berada di pusat (Lintas Sektoral). Hal ini dikarenakan antara lain kurangnya Sarana dan prasarana pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya, sehingga dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan menjadi terhambat.

#### **Kendala Eksternal**

- a. Belum semua stakeholders memahami tupoksi Balitbangda Prov. Kaltim sehingga sering terjadi mispersepsi terhadap badan ini yang mengakibatkan koordinasi menjadi terhambat.
- b. Masih dirasakan adanya duplikasi tupoksi antara lembaga Balitbangda dengan lembaga daerah lainnya,

sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan sejenis dan kurang intensifnya koordinasi, serta pembinaan kelitbangan yang menjadi tugas pokok Balitbangda

- c. Belum sepenuhnya hasil keluaran litbang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga terkesan keluaran litbang menjadi dokumentasi saja.
- d. Paradigma bahwa kemajuan Iptek dapat menjadi pendorong daya saing dan peningkatan ekonomi (Knowledge based economy) belum mendapat tempat yang selayaknya.
- e. Belum optimalnya sinergitas 3 (tiga) aktor, yakni kelompok ABG (Academician atau pakar intelektual, Business sector. Atau pelaku usaha/korporasi, serta Government atau pemerintah). Fungsi regulasi pemerintah dan fungsi kecendekiawanan tidak banyak berarti tanpa dukungan pembiayaan (Financial Support) dan penerapan teknologi.

Struktur organisasi lebih menggambarkan karakteristik birokrat daripada teknokrat, membuat aktivitas litbang terpaku pada dikotomi ini.

Menghadapi permasalahan dan kendala, Balitbangda Prov Kaltim telah mengambil beberapa langkah solusi :

- a. Secara bertahap merubah pola pikir (Mind set) dikalangan internal dengan menekankan perubahan cara berpikir dan cara pandang birokrasi ke pola pikir dan cara pandang teknokrat yang profesional.
- b. Secara bertahap dan terencana mengikut sertakan personil (Staf dan Peneliti) dalam pendidikan dan pelatihan baik diklat fungsional maupun struktural untuk meningkatkan kompetensi personil.
- c. Selain itu untuk menanggulangi kekurangan personil (peneliti) telah diusulkan untuk merekrut secara khusus tenaga peneliti setiap tahunnya
- d. Memperluas jejaring kerja antar lembaga lintas sektor, baik di daerah maupun dengan lembaga yang ada di pusat. Sebagai contoh Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD) yang sudah ada di tiga sub regional secara bertahap akan diperluas ke Kabupaten Kota di Kalimantan Timur.

Balitbangda Prov. Kaltim dalam hubungan memperluas jejaring kerja, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membuat beberapa kesepakatan kerjasama, diantaranya dengan :



- a. Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM
- b. Balitbang Pertanian Departemen Pertanian RI
- c. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- d. Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhanas ) RI
- e. Badan Standarisasi Nasional ( BSN )
- f. Institut Pertanian Bogor
- g. Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
- h. Lembaga Administrasi Negara ( LAN ) RI

Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya dan dana agar lebih efisien dan terfokus pada bidang prioritas. Fokus Litbang kedepan yaitu :

- a. Litbang Teknologi Pangan
- b. Litbang Teknologi Energi Alternatif dan Terbarukan
- c. Litbang Manajemen Transportasi
- d. Litbang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Litbang Kesehatan dan obat-obatan
- f. Litbang Pertahanan Keamanan

Secara bertahap mendukung adanya perubahan struktur organisasi yang lebih mencirikan struktur fungsi, agar lebih dinamis dan efisien

Untuk meningkatkan minat menjadi peneliti, secara bertahap akan diusulkan kepada Pemprov. Kaltim untuk memberikan insentif dan fasilitas kerja yang memadai bagi tenaga Peneliti.

**n. Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan RENSTRA Bandiklat Provinsi Kaltim, pada tahun 2011 lalu, khususnya terkait dengan pelaksanaan Belanja Langsung Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat 9 program dan 32 kegiatan yang bersifat pelayanan administrasi, operasional dan pemeliharaan relatif lebih menonjol, yang merupakan lingkup program yang bersifat penunjang, baik untuk keperluan melengkapi fasilitas fisik, berupa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur maupun kegiatan yang bertendensi terhadap pengembangan kediklatan.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 lalu Badan Diklat Provinsi Kaltim mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 29.837.593.610,- terealisasi penyerapan keuangan mencapai Rp 48,66 milyar



(83,67 persen), sehingga masih tersisa dana Rp 9,5 milyar yang masih belum terserap.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Diklat Aparatur terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Dalam lingkup Diklat Teknis Fungsional masalah yang terjadi adalah terdapat 10 (sepuluh) kegiatan Diklat yang tidak dapat dilaksanakan, karena masalah teknis perubahan pembiayaan dalam anggaran yang prosesnya disyahkan pada akhir tahun sedangkan waktunya sangat sempit untuk dilaksanakan Selain daripada itu, dalam lingkup Diklat Teknis Fungsional ini dihadapkan pula pada masalah minimnya minat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengirimkan Aparat-nya mengikuti kegiatan diklat yang dilaksanakan ;
- b. Karena dalam pertengahan tahun terkendala dengan perpindahan ke Kantor yang baru, sehingga waktu banyak tersita untuk penataan ruang kerja dan lainnya.

Dalam mengatasi beberapa masalah tersebut diatas maka beberapa langkah strategis yang dianggap perlu untuk dilakukan Bandiklat Provinsi Kaltim pada tahun 2011 :

- a. Dari aspek perencanaan terhadap jumlah peserta yang akan mengikuti Diklat, dikonfirmasi terlebih dahulu dengan BKD dan Satuan Kerja-nya masing-masing, sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Tugas dari Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, sehingga dengan cara ini akan memberikan kepastian jumlah peserta yang mengikuti Diklat Aparatur, terutama Diklat Teknis Fungsional ;
- b. Peserta Diklat Teknis Fungsional melibatkan pula Aparat dari Kabupaten/Kota se-Kaltim, yang pemberitahuannya dilakukan sejak dini ;
- c. Pengaturan jadwal kegiatan Diklat Aparatur diatur secara optimal terhitung sejak Januari s/d November 2011, mengingat jumlah Diklat Teknis Fungsional yang relatif banyak dan untuk Diklat, maka kendala pengaturan kelas dan fasilitas penunjang penyelenggaraan Diklat sudah dapat diatasi sejak dini ;
- d. Kekurangan tenaga pengajar (widyaiswara), khususnya yang ahli dalam bidang diklat teknis dan fungsional, diatasi dengan melibatkan pejabat Struktural dan fungsional dari Kabupaten/Kota setempat sebagai tenaga pengajar.

**o. Inspektorat Provinsi, dengan ;**

**1. Program dan Kegiatan**

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana urusan wajib dengan 6 Program dan 25 Kegiatan pada tahun 2011 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2011, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mengelola anggaran sebesar Rp. 14.440.220.500,- dan terealisasi dengan capaian kinerja 85,49 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**p. Badan Kepegawaian Daerah, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan 8 Program dan 41 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.352.608.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.502.273.240,00,- dengan capaian kinerja sebesar 75,42 persen.

**a. Program pendidikan kedinasan**

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

Kegiatan ini merupakan Program dan kegiatan yang menyusun dan merencanakan Pelaksanaan kompetensi jabatan serta pengiriman tenaga Assessment center dan Pengirim Diklatpim Tingkat II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian kinerja kegiatan ini sebesar 90,36 persen.

**b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur**

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah merupakan program utama atau program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2011 yang terdiri 13 kegiatan

- Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS.

Kegiatan ini memuat perencanaan karir pejabat struktural, melaksanakan Baperjakat, melaksanakan

- pelantikan Pejabat struktural, pengangkatan dan pemberhentian Jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Prosentase pencapaian realisasi Anggaran sebesar 95,76 persen
- Seleksi Penerimaan Calon PNS.  
Kegiatan ini berisi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan penyusunan formasi Pemprov dan Kabupaten/Kota se Kaltim. Pelaksanaan Seleksi Calon PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Pelaksanaan Seleksi Calon PNS di Kabupaten/Kota, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur hanya memfasilitasi pendistribusian soal CPNS ke Kabupaten/Kota dengan Tim Inspektorat, Kepolisian dan instansi terkait. Namun pada Tahun 2011 adanya moratorium secara Nasional (tidak ada Penerima CPNS) dengan Prosentase pencapaian realisasi Anggaran tahun 2011 sebesar 17,70 persen.
  - Penempatan PNS.  
Kegiatan ini berisi pelaksanaan Penempatan dan penataan PNS dan penyelesaian masalah-masalah Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi Anggaran tahun 2011 sebesar 87,61 persen.
  - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.  
Kegiatan ini berisi pelaksanaan kegiatan Kenaikan Pangkat yang dilakukan dua periode dalam satu tahun yaitu periode April dan periode Oktober tahun berjalan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Prosentase pencapaian realisasi Anggaran 2011 sebesar 93,85 persen.
  - Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.  
Kegiatan ini berisi Penyusunan data Kepegawaian dengan menggunakan dua aplikasi yaitu SAPK yang bekerjasama dengan BKN Jakarta dan Sistem Informasi Kepegawaian yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Dengan rincian kegiatannya adalah Validasi data, serta penyusunan buku, buku profil, brosure kepegawaian di

lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi anggaran 2011 sebesar 92,68 persen

- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi  
Kegiatan ini berisi proses Pemberian bantuan berupa Tali Asih bagi PNS yang purna tugas dan Pemberian bantuan PNS sakit, wafat masih dalam tugas serta pemberian bantuan medical check-up dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi Anggaran 2011 sebesar 37,98 persen
- Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS  
Kegiatan ini berisi pelaksanaan rapat pertimbangan, pelaksanaan sumpah janji, pelaksanaan Pembinaan PNS pengusulan Karis/Karsu dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian kinerja kegiatan sebesar 96,92 persen
- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas  
Kegiatan ini adalah melakukan perencanaan proses pengiriman tugas belajar dan pemberian bantuan bagi PNS ijin belajar serta ikatan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prosentase pencapaian realisasi Anggaran 2011 sebesar 97,20 persen
- Pemberian bantuan Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN  
Kegiatan ini adalah hanya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka Seleksi Penerimaan Praja IPDN di lingkungan Kabupaten/Kota se Kaltim dan Pembinaan Praja IPDN di Jatinagor Jawa Barat dengan Prosentase Pencapaian ralisasi anggaran sebesar 95,45 persen
- Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi Penyusunan Modul  
Kegiatan ini adalah hanya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengiriman Diklat Teknis, diklat fungsional lainnya (bimtek) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Prosentase pencapaian realisasi anggaran sebesar 98,75 persen
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Kegiatan ini adalah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memonitor serta mengevaluasi program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Prosentase pencapaian realisasi anggaran sebesar 82,61 persen
- Penyelenggaraan Sosialisasi pelaksanaan Konseling  
Kegiatan ini adalah Pembinaan PNS yang akan purna tugas berupa bimtek serta melakukan Ovservasi lapangan (OL) agar PNS tersebut bisa mandiri/berdikari dengan prosentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar 82,59 persen
  - Ujian Dinas  
Kegiatan ini adalah melakukan pendataan PNS yang mengikuti ujian dinas dari Gol. I/d ke II/a, II/d ke III/a dengan Prosentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar 63,30 persen
  - Rapat Kerja Kepegawaian  
Kegiatan ini adalah melakukan Rapat Kerja Kepegawaian se Kaltim yang dihadiri oleh Kepegawaian Kabupaten/Kota se Kaltim dan SKPD Provinsi untuk menyatukan Persepsi dalam Pemahaman Peraturan di Bidang Kepegawaian dengan Prosentase pencapaian realisasi anggaran tahun 2011 sebesar 87,94 persen

**q. Kantor Penghubung Provinsi di Jakarta, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran guna mewujudkan Visi dan Misi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, maka untuk tahun anggaran 2011 direncanakan Program dan Kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Informasi Pembangunan, Potensi dan Peluang Investasi
- g. Peningkatan Manajemen Kerja

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pencapaian target kinerja APBD tahun anggaran 2011 pada SKPD Kantor Penghubung di Jakarta terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan melalui retribusi sewa kamar mess ke daerah ditergetkan sebesar Rp. 130.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 158.155.000,- melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai sekitar 121,66 persen. Sedangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 10.306.324.500,- dan realisasinya sebesar Rp. 9.737.698.801,- atau sekitar 94,48 persen.

### **r. Sekretariat KORPRI, dengan :**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana urusan wajib Otonomi Daerah dengan 6 Program dan 25 Kegiatan pada tahun 2011 yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada Tahun Anggaran 2011, Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Timur telah mengelola anggaran sebesar Rp. - dan terealisasi dengan capaian kinerja 78,80 persen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **XVII. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes**

### **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, dengan:**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dengan 11 Program dan 37 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 yang merupakan pelaksanaa kebijakan Pemerintahan Daerah.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Alokasi dana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 12.745.167.270, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (APBD Murni + APBD Perubahan) sebesar 4.485.659.000,- dan Belanja Langsung (APBD Murni + APBD Perubahan) sebesar Rp. 8.259.508.270,- terealisasi sebesar Rp. 11.418.250.153,- (89,59 persen)

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - Terlaksananya kegiatan fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di 93 kecamatan di 10 Kabupaten.
  - Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebanyak 281 lembaga LPM, 12 lembaga UPM, dan 14 lembaga UPM.
- b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
  - Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa sebanyak 30 pasar desa yang dibina dan sebanyak 30 BUMDES yang dibina di 10 kabupaten.
- c. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Terlaksananya pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa sebanyak 1216 desa/kelurahan di 14 Kabupaten/Kota.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

- a. Sumber daya aparatur (pegawai) yang tersedia, sebagian masih belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- b. Belum tertanamnya pola kerja yang efektif dan efisien, sehingga kinerja pegawai masih belum menunjukkan hasil yang maksimal guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Solusi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- b. Melakukan penataan dan memberikan peluang bagi setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuannya.
- c. Mendorong dan menumbuhkan semangat bagi setiap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar.
- d. Membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dalam setiap penyelesaian tugas dan permasalahan yang dihadapi.



## **XVIII. Urusan Wajib Sosial**

**Dinas Sosial, dengan :**

### **1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 yang ditetapkan untuk dilaksanakan selain terdiri dari Program dan Kegiatan yang ada pada setiap SKPD (sebanyak 12 Program dan 46 Kegiatan) juga terdapat Program dan Kegiatan yang merupakan Urusan Wajib Sosial.

### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2011 sebesar Rp. 55.598.939.160,- terealisasi Rp. 48.371.491.966,- dengan capaian kinerja 87,00 persen.

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah

#### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pembenahan dan Penataan Arsip



- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
  - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
  - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
- f. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**
  - Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin
  - Perencanaan dan monitoring Program-program Kessos.
- g. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
  - Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana public bagi penyandang cacat dan lansia
  - Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
  - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
- h. Program Pembinaan Anak Terlantar**
  - Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
  - Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
  - Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

- j. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**
  - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
- k. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**
  - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
- l. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
  - Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
  - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
  - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

**XIX. Urusan Wajib Budaya dan Pilihan Pariwisata :  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 untuk dilaksanakan selain terdiri dari 10 Program dan 32 Kegiatan yang ada pada setiap SKPD yang dijabarkan dalam RENSTRA Dinas tahun 2009-2013.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2011 sebesar Rp. 19.136.688.670,- terealisasi Rp. 17.102.469.706, dengan capaian kinerja 89,37 persen.

**a. Program pengembangan pemasaran pariwisata**

- Analisis pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata.

**b. Program pengembangan destinasi pariwisata**

- Peningkatan dan Pengembangan destinasi Pariwisata Seni, Budaya dan Film Provinsi Kaltim.
- Pengembangan objek pariwisata unggulan.

**c. Program pengembangan kemitraan**

- Peningkatan dan Pengembangan Kemitraan, usaha jasa dan sarana pariwisata.

**d. Program Nilai Budaya Seni dan Film.**

- Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Film.

**e. Program pengelolaan kekayaan budaya :**

- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.

**f. Program pengelolaan keragaman budaya :**

- Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal.
- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.

**XX. Urusan Wajib Kearsipan  
Badan Arsip Daerah, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 yang ditetapkan untuk dilaksanakan selain terdiri dari Program dan Kegiatan yang ada pada setiap SKPD (sebanyak 5 Program) juga terdapat Program dan Kegiatan yang merupakan Urusan Wajib Kearsipan (sebanyak 4 Program), yang terdiri dari :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah;
- Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan kearsipan Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2011 sebesar Rp. 13.948.067.100,- terealisasi Rp. 9.221.285.218. realisasi keuangan 66,11 persen fisik 93,48 persen.

**a. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**

- Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
- Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

**b. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**

- Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
- Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

**3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

Adapun permasalahan dalam melaksanakan pencapaian program dan kegiatan Badan Arsip Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana terutama ruang untuk penyimpanan arsip mengingat Pembangunan Depo Arsip berlantai 4 sampai dengan akhir tahun 2011 belum rampung dilaksanakan, bahkan anggaran untuk lanjutan pembangunan Depo Arsip yang tersedia pada DPA Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 tidak direalisasikan sama sekali.
- b. Terbatasnya kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia kearsipan dalam hal ini pejabat fungsional kearsipan masih belum memiliki sertifikasi keahlian dibidangnya.
- c. Kurangnya pemahaman dan teknis pelaksanaan program dan kegiatan dari sub-sub bidang yang ada dengan menyesuaikan jadwal (schedule) yang telah ditetapkan sehingga pencapaian kinerja tidak optimal.

Solusi :

- a. Dalam upaya mengatasi terbatasnya sarana terutama ruang untuk penyimpanan arsip adalah dengan mengupayakan penyelesaian Pembangunan Depo Arsip, Alokasi anggaran yang telah diterima untuk lanjutan Pembangunan Depo Arsip pada DPA Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) hendaknya dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan perundang0undangan yang berlaku.
- b. Pejabat fungsional Arsiparis yang ada pada Badan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Timur hendaknya segera diikutkan dalam Sertifikasi Kearsipan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap sub-sub bidang hendaknya dikoordinasikan dengan baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

## **XXI. Urusan Wajib Perpustakaan**

**Badan Perpustakaan Daerah, dengan:**

### **1. Program dan kegiatan**

Untuk mendukung kebijakan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 telah melaksanakan 7 program dan 31 kegiatan untuk tercapainya kinerja secara optimal sebagaimana yang tertuang pada RPJMD SKPD.

### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Anggaran Belanja Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp 16.275.574.900,- APBD-P sebesar Rp. 5.006.577.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp. 21.282.151.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.490.338.657,- atau sebesar 77,48 persen.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa layanan informasi sekaligus sebagai lembaga teknis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas membina dan mengembangkan berbagai jenis perpustakaan di daerah.

Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan.

Permasalahan mendasar yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

*Kegiatan Pembinaan Perpustakaan belum berjalan secara optimal*

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur adalah dalam rangka memberdayakan semua jenis perpustakaan belum dapat berjalan secara optimal, hal tersebut dikarenakan :

- a. Kondisi berbagai jenis perpustakaan sebagian besar masih lemah dan belum memperoleh perhatian dari Instansi yang bersangkutan.
- b. Bantuan/stimulasi berupa buku dan sarana Perpustakaan yang diberikan kepada Puskesmas, Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota belum dapat dikembangkan sesuai yang diharapkan.
- c. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan belum melaksanakan fungsinya dengan optimal.

Solusi :

- a. Mengoptimalkan peran dan fungsi perpustakaan umum Kabupaten/Kota sebagai katalisator sekaligus sebagai mitra kerja dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah Kabupaten/Kota dengan cara :
  - Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Pegawai perpustakaan umum Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan pada kegiatan orientasi, bimtek, magang dan kegiatan sejenis lainnya
  - Memberikan bantuan buku dan sarana perpustakaan
  - Melaksanakan pendataan berbagai jenis perpustakaan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - Memaksimalkan peran Dewan Perpustakaan dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- b. Menggalakkan gerakan kampanye minat baca masyarakat melalui berbagai metode dan pendekatan seperti :
  - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan monitoring secara berkala.
  - Melaksanakan penyuluhan minat dan kebiasaan membaca
  - Membuat stiker, spanduk, bildboord, pamflet, brosur dan profil perpustakaan
  - Melaksanakan talk show minat baca dan road show pameran perpustakaan di Kabupaten/Kota
  - Melaksanakan lomba-lomba seperti : mengarang, bercerita, baca puisi, pidato, dan lomba perpustakaan terbaik
  - Pemilihan duta baca dan Pustakawan berprestasi
  - Mendorong terbentuknya organisasi ATPUSI di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- c. Meluncurkan program gerakan cinta buku dan perpustakaan dengan melibatkan tokoh masyarakat antara lain :
  - Membentuk pengurus Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) pada setiap Kabupaten/Kota.
  - Menghimbau tokoh masyarakat melaksanakan kegiatan wakaf buku.

## **C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan.**

### **I. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan :**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Program merupakan program kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Dengan demikian program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya manusia yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu, maka program kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Pada Tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 14 Program dan 30 kegiatan.

#### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi dan Realisasi Anggaran sumber Pembiayaan Rutin dan Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp. 51.679.369.300,- dan terealisasi sebesar Rp 45.378.686.310,- dengan capaian kinerja 87,81 persen.

Adapun output utama yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain :

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
  - Pengadaan Tandon Air Untuk Masyarakat Pesisir sebanyak 10 unit di Kab. Berau
  - Pengadaan Etalase Pengembangan Usaha Pesisir sebanyak 10 Unit di Kab. Berau dan Kab Kukar
  - Pengadaan Peralatan Gift Shop sebanyak 10 paket di Kab. Berau
  - Pembuatan Para-para Penjemuran Ikan sebanyak 6 unit di Marangkayu, Kab. Kukar.
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
  - Pembuatan dan penanaman transplantasi karang sebanyak 50 unit di Kab Bulungan dan Kab Berau
  - Pembuatan dan penanaman terumbu buatan sebanyak 50 unit di Kab Bulungan dan Kab Berau

- Penanaman mangrove sebanyak 14.500 pohon di Tanjung Batu - Berau
- Restocking benih ikan di kawasan reservat sebanyak 80.000 ekor di Kab. Kukar
- c. Program pengembangan budidaya perikanan
  - Pengadaan bibit ikan karamba percontohan di eks tambang sebanyak 5.000 ekor di Kota Samarinda
  - Pembangunan bak pendederan di BBIP Talisayan di Berau
- d. Program pengembangan perikanan tangkap
  - Pengadaan alat tangkap Gill Net Perairan Laut sebanyak 50 unit di Kota Balikpapan, Kab. PPU dan Kab Nunukan
  - Pengadaan mesin ketinting, perahu dan gill net sebanyak 20 unit di Kab. Kubar dan Kab Kukar
  - Pengadaan kapal dan perlengkapannya sebanyak 10 unit di Kab. Berau dan Kab Paser
  - Pengadaan alat tangkap bubu sebanyak 20 unit di Kota Balikpapan
  - Pengadaan mesin ketinting 31 PK sebanyak 5 unit di Kab Kukar
  - Pengadaan mesin ketinting 6 PK sebanyak 30 unit di Kab. Kubar dan Kab Kukar
  - Pengadaan peralatan perbengkelan sebanyak 2 paket di Kota Samarinda dan Kab. PPU
  - Pengadaan bantuan kapal, mesin dan alat tangkap sebanyak 1 paket di Kab. Kutim
  - Pengadaan Kapal perikanan tangkap 30 GT sebanyak 5 unit di Kota Samarinda, Kab. Bulungan, Kota Bontang, Kota Tarakan dan Kab Berau.
- e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
  - Pengadaan fasilitas Unit Pengolahan Skala Kecil untuk mendukung industri pengolahan sebanyak 1 paket di Kota Balikpapan



- Sosialisasi Gemar Makan Ikan di 5 lokasi yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kukar, Kota Tarakan, dan Kab. Berau.
- f. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
  - Paket bantuan benur sebanyak 4 paket di Kab Kukar, Kota Balikpapan, Kab PPU, dan Kab Bulungan
  - Paket bantuan benih ikan nila dan pakan sebanyak 5 paket di Kab. Kukar, Kab, Kubar, Kota Samarinda, Kab. Malinau dan Kab Tana Tidung
  - Paket bantuan polyculture (Rumput laut, Udang, Bandeng) sebanyak 5 pake di Kan Kukar, Kota Balikpapan, Kab. PPU, Kota Bontang, dan Kab. Nunukan
  - Paket bantuan nener sebanyak 5 paket di Kab Kukar, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. PPU dan Kab Nunukan.
  - Perbaikan saluran irigasi BBI (Balai Benih Ikan) Sebulu sebanyak 1 paket di Kab. Kukar
  - Pembersihan dan pendalaman waduk BBI Sebulu sebanyak 1 paket di Kab. Kukar
  - Pembuatan kolam ikan hias di Pusat Pelatihan Perikanan sebanyak 1 paket di Muara Badak, Kab. Kukar
  - Pembuatan kolam percontohan di Pusat Pelatihan Perikanan sebanyak 1 paket di Muara Badak, Kab. Kukar

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terjadi untuk sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur dalam hal pencapaian target realisasi adalah sebagai berikut :

- a. Umumnya armada perikanan di Kaltim masih dibawah 5 GT yang mana daya jelajah untuk wilayah penangkapan hanya berkisar pada 13 mil pantai, sehingga hasil tangkapan menjadi kurang maksimal.
- b. Sulitnya mendapatkan serta mahalnya bahan bakar solar untuk melaut sehingga banyak nelayan yang mengurangi waktu dalam menangkap ikan.

- c. Munculnya penyakit ikan dan udang seperti KHV (Koi Herves Viruses) dan White Spot yang menyebabkan para pembudidaya ikan dan udang merugi.
- d. Jaringan irigasi tambak di Kalimantan Timur umumnya hanya satu jalur, yang mana hal ini memudahkan penularan penyakit.
- e. Masih maraknya penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti : Bom, Setrum dan Trawl.

Solusi :

- a. Meningkatkan kemampuan armada perikanan Kaltim yaitu dengan memberikan bantuan mesin kapal 30PK sehingga diharapkan daya jelajah penangkapan ikan bisa lebih maksimal.
- b. Menambah jumlah SPDN (Solar Package Dealer Nelayan) di beberapa daerah sehingga dapat menyediakan bahan bakar solar serta nelayan dapat membeli bahan bakar solar sesuai harga yang ditetapkan oleh Pertamina.
- c. Menggalakkan sosialisasi akan pentingnya menjaga kualitas air yang dalam hal ini adalah satu diantara penularan penyakit terbesar untuk ikan dan udang, serta meningkatkan pengetahuan para pembudidaya ikan dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan.
- d. Memperluas dan memperbanyak saluran irigasi tambak di sentra-sentra tambak Kaltim sehingga kebutuhan akan air tambak dapat terpenuhi.
- e. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terpadu di lapangan serta menindak segala pelanggaran hukum sektor perikanan sehingga akan memberikan efek jera kepada yang menggunakan alat tangkap terlarang.

## **II. Urusan Pilihan Pertanian**

### **a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan & UPTD, dengan :**

#### **1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan UPTD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 yang terdiri dari 41 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

(sumber anggaran Ditjen. Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian).

- b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (sumber anggaran Ditjen. Hortikultura, Kementerian Pertanian).
- c. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, industri Hilir, Pemasaran dan Eskpor Hasil Pertanian (sumber anggaran Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kementerian Pertanian).

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Alokasi dan realisasi anggaran guna pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 62.590.020.880,- terealisasi sebesar Rp. 52.413.219.622,- atau sebesar 83,74 persen.

### **a. Program peningkatan kesejahteraan petani :**

- Peningkatan kemampuan lembaga petani
- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
- Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

### **b. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian :**

- Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian
- Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
- Pengembangan diversifikasi tanaman
- Penyuluhan sumber pangan alternatif
- Penyusunan data base potensi produksi pangan
- Pengembangan perbenihan/perbibitan

### **c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi tanaman pangan :**

- Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah
- Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian masyarakat

### **d. Program peningkatan produksi pertanian :**

- Pengembangan bibit unggul pertanian

**e. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian :**

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna
- Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam

**3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian program antara lain :

- Kondisi infrastruktur sebagai pendukung utama belum cukup memadai sehingga berpengaruh pada proses produksi dan distribusi
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana fisik berupa bangunan, jaringan tata air, alat mesin pertanian, dan lain-lain.
- Kepemilikan lahan masih relatif kecil dan umumnya belum memenuhi skala ekonomi, sehingga diperlukan konsolidasi manajemen pengelolaan yang lebih rasional yang didukung oleh kelembagaan agribisnis dan agroindustri yang efektif.
- Skala usaha yang dikembangkan pada umumnya relatif kecil dan terpencar-pencar yang disebabkan oleh luas kepemilikan lahan yang sangat terbatas, sehingga secara ekonomi kurang menguntungkan dalam agribisnis yang menuntut ketersediaan produksi dalam volume dan kualitas yang memadai dan kontinyu.
- Terjadinya penyusutan areal usaha tani pada daerah-daerah tertentu sebagai dampak dari konsekuensi logis pembangunan daerah, sehingga secara kuantitas pertambahan areal tanam masih belum maksimal.
- Ketersediaan alat mesin pertanian terutama alsin pengolahan hasil sangat terbatas dan masih sulit dimiliki kelompok tani karena harganya mahal. Hal ini menyebabkan produk pertanian terutama produk

hortikultura umumnya dijual dalam bentuk primer (segar).

- g. Masih rendahnya daya saing hasil produksi pertanian baik dalam bentuk segar maupun olahan dalam hal kualitas dan harga dibanding produk luar. Hal ini disebabkan karena sistem usaha tani belum dikelola secara profesional dengan berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis secara optimal.
- h. Penerapan teknologi budidaya masih rendah misal dalam penerapan agroinput, penggunaan benih berlabel belum optimal, jarak tanam tidak seragam, aplikasi pupuk masih minimal, pengendalian OPT belum optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas yang dicapai. Selain itu mutu hasil produk rendah, kadar air dan kotoran tinggi, oleh karena RMU belum memenuhi standar, sehingga kualitas produk kurang kompetitif di pasar.
- i. Keterbatasan modal usaha dan sulitnya mendapatkan modal secara kredit dengan bunga rendah, prosedur mudah dan dapat dimanfaatkan tepat waktu sesuai kebutuhan petani.
- j. Masih rendahnya kompetensi, kapabilitas dan kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha tani dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga terjadi ketidak sebandingan antara luas lahan yang ada dengan kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia.
- k. Kerjasama/kemitraan belum berkembang baik, sehingga petani masih kesulitan memasarkan produknya.
- l. Kemajuan teknologi dan informasi pertanian belum banyak dimanfaatkan di tingkat petani, sehingga petani pada umumnya masih mengembangkan pola-pola pemasaran tradisional.
- m. Pengaruh perubahan iklim global. Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan dan hortikultura sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim global, dalam wujud pengaruh el Nino (kemarau) dan la Nina (penghujan)

Solusi :

- a. Memantapkan pola intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi serta efisiensi sumberdaya pertanian dan teknologi spesifik lokasi
- b. Perluasan areal tanam terutama mengoptimalkan pemanfaatan lahan terlantar/beros, membangun/merehabilitasi jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta sarana pengairan, mengembangkan penangkar benih serta mengfungsikan balai-balai benih
- c. Peningkatan indeks pertanaman bagi daerah - daerah sentra pertanian melalui pengembangan alat-alat mesin pertanian
- d. Pengadaan alat-alat pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian
- e. Meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pertanian yang berorientasi pada kebutuhan pasar
- f. Pembangunan pertanian diarahkan kepada pendekatan keterpaduan komoditi, wilayah dan usahatani yang mencakup sub sistem hulu, on farm dan hilir
- g. Pengembangan kemitraan dan usahatani
- h. Peningkatan SDM dan penyuluhan pertanian serta kelompok tani
- i. Peningkatan dukungan kelembagaan pertanian.

#### UPTD SPP-SPMA

- Program Pelayanan administrasi perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur.
- Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- Program Peningkatan pembinaan pendidikan SPP-SPMA.

#### UPTD BBI Holtikultura

- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan disiplin aparatur.
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

#### UPTD BBI Padi

- Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

#### UPTD BBI Palawija

- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

#### UPTD PTPH

- Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

#### UPTD PSBTPH

- Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

#### **b. Dinas Perkebunan dan UPTD, dengan :**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 yang ditetapkan untuk dilaksanakan terdiri dari 28 Program dengan Kegiatan yang ada pada SKPD dan UPTD Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

##### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 Alokasi anggaran APBD yang diterima sebesar Rp. 45.178.014.870,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.180.841.417,- atau sebesar 77,88 persen.

**a. Program peningkatan produksi perkebunan :**

- Pengembangan bibit unggul perkebunan
- Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan, waralaba, penyusunan RKDK pupuk dan inventarisasi plasmanutfah
- Pengembangan dan operasional PIR swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat

**b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan:**

- Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah
- Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat

**c. Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan:**

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna
- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna
- Pelatihan penerapan teknologi perkebunan modern bercocok tanam
- Uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada tanaman perkebunan

**d. Program peningkatan kesejahteraan petani kebun :**

- Peningkatan kemampuan lembaga petani
- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur

**e. Program pemberdayaan penyuluh perkebunan lapangan :**

- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh perkebunan
- Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh perkebunan
- Penyuluhan dan pendampingan bagi perkebunan
- Pemberdayaan dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan

**f. Program peningkatan ketahanan pangan perkebunan :**

- Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan



- Pengembangan diversifikasi tanaman
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan
- Penyuluhan sumber pangan alternative
- Penyusunan data base potensi produksi pangan
- Pengembangan perbenihan/perbibitan
- Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet pola PIR Swadaya di wilayah Kalimantan Timur tahun 2011 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam pengembangan perkebunan rakyat Pola PIR Swadaya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011 pengadaan untuk bibit karet tidak terserap secara keseluruhan hal ini disebabkan karena kontraktor tidak bisa memenuhi semua kebutuhan karet yang diperlukan (kontraktor *wanprestasi*)
- b. Kemampuan tehnis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit.
- c. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru dilakukan oleh petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan-lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan lahannya dalam satu hamparan.
- d. Para Petugas Lapangan (PPL) Swadaya dan tahapan-tahapan pengembangannya sehingga sebagian petani peserta belum sepenuhnya paham dengan program.
- e. Dalam distribusi bantuan petani masih belum disertai dengan pendampingan yang maksimal melalui konsep pola pemberdayaan petani (sistem kebersamaan ekonomi) sehingga dikhawatirkan

pengelolaan bantuan oleh petani belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Solusi :

- a. Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar-penagkar bibit lokal yang dengan lokasi pengembangan sehingga di dalam penyiapan bibit kelapa sawit dan karet diharapkan pihak ketiga dapat membeli dari penangkar penagkar tersebut.
- b. Perencanaan penyiapan bibit tanaman kelapa sawit dan karet dilapangan disesuaikan dengan kebutuhan bibit untuk pengembangan setiap bulan.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani melalui pelatihan pelatihan dan kunjungan belajar untuk meningkatkan kemampuan tehnis dan manajemen kelompok tani kelapa sawit dan karet sehingga dilapangan terlaksana dengan baik.
- d. Usulan calon petani dan calon lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten.
- e. Peningkatan kemampuan petugas lapangan (PPL) melalui pembinaan dan pelatihan, pertemuan-pertemuan tehnis PIR Swadaya.
- f. Mekanisme penyusunan anggaran selalu dihadiri oleh instansi yang membidangi panggar eksekutif dan komisi legislatif bersama dengan yang mengajukan anggaran baik secara formal maupun informal.
- g. Setiap pemberian bantuan petani agar selalu disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen kelompok (sistim pengelolaan bantuan yang diterima)

**c. Dinas Peternakan, dengan :**

**1. Program dan kegiatan**

Program Pembangunan Peternakan melalui APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang meliputi 4 (empat) program terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran atau eks Belanja Administrasi Umum (Kepmendagri No. 29 Tahun 2003) dan 8 (delapan) kegiatan terkait dengan program pembangunan peternakan yang langsung kepada masyarakat.

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran pembangunan dan rutin sektor peternakan di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBD. Pada tahun 2011 Anggaran Peternakan dialokasikan sebesar Rp.47.833.050.500,- terealisasi Rp. 43.539.285.911, dengan capaian kinerja 91,02 persen.

### **a. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit**

#### **1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular**

- Pengadaan peralatan Puskesmas (check Point) sebanyak 1 Paket di kabupaten Paser
- Pembentukan Kader Vaksinator Rabies 1 Kegiatan di kabupaten Kukar, Kutim, dan Kubar

### **b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**

#### **1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat**

- Penyebaran Ternak Sapi PoTong sebanyak 400 Ekor di kabupaten Kubar, Berau, Bulungan, dan Tana Tidung
- Pemberdayaan Peternak Sapi sebanyak 273 ekor di kabupaten Kukar, Kutim, dan Kubar
- Pengadaan Ternak Itik sebanyak 3.300 ekor di kabupaten Kutim.

#### **2. Pengembangan Agribisnis Peternakan**

- Penggemukan Ternak Sapi PoTong sebanyak 126 ekor di kabupaten Balikpapan, Kukar, dan Tarakan
- Pengadaan Timbangan Digital Ternak sapi sebanyak 1 Unit di Kota Samarinda

#### **3. Penyusunan Kebijakan Program dan Monitoring Evaluasi**

- Identifikasi Penyusunan Program sebanyak 1 Paket di 14 Kabupaten/Kota

- Rakontekda Pembangunan Peternakan sebanyak 1 Kegiatan di kabupaten Berau
- Monitoring dan Evaluasi sebanyak 1 Paket di 14 Kabupaten/Kota
- 4. Pengembangan Pembibitan dan Budidaya
  - Fasilitas Pengembangan Sapi VBC sebanyak 20 ekor di kabupaten Kukar
  - Fasilitas Pengembangan Kerbau VBC sebanyak 17 ekor di kabupaten PPU
  - Penjaringan Ternak Sapi Bibit Unggul sebanyak 50 ekor di kabupaten Kukar
  - Pembelian Sapi Betina Bunting BC Ex Import sebanyak 100 ekor di kabupaten PPU
  - Pengembangan Babi sebanyak 175 ekor di kabupaten Kubar
  - Pembelian Bibit Kerbau Jantan sebanyak 44 ekor di kabupaten Kukar
  - Plasma Nutfah Bibit Ayam Lokal sebanyak 100 ekor di Kota Samarinda
- 5. Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
  - Penyebaran Ternak Sapi sebanyak 400 ekor di kabupaten Kukar, Kutim, PPU, dan Paser
- 6. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Peternakan
  - Pembuatan Puskeswan sebanyak 1 Unit di kabupaten Berau
  - Pembangunan Rumah PoTong Hewan (RPA) sebanyak 1 Unit di kabupaten PPU
- c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
  1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
    - Sosialisasi Publik Awareness Peduli Asuh dan Zoonosis sebanyak 1 Paket di Kota Samarinda

- Sosialisasi PemoTongan Ayam ASUH dan Zoonosis sebanyak 4 paket di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Tarakan
  - Penguatan Usaha Kelompok sebanyak 2 kelompok di kabupaten Kukar
  - Pengadaan Peralatan Rumah PoTong Unggas Skala Kecil di kabupaten PPU
- d. Program Peningkatan Pemasaran Penerapan Teknologi Peternakan
1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna (IB dan ET)
- Peralatan Insensinator pada Sapi sebanyak 5 Paket di kabupaten Balikpapan, Kukar, PPU, Paser, dan Berau
  - Peralatan Pemeriksaan Kebuntingan pada Sapi sebanyak 6 Paket di kabupaten Balikpapan, Kukar, PPU, Berau, dan Bulungan
  - Pengadaan Semen Beku Sapi sebanyak 4.000 dosis di kabupaten Balikpapan, Kukar, PPU, Paser, Berau, Bulungan, dan Nunukan
  - Pengadaan Obat Kemajiran/Gertak Birahi sebanyak 1 Paket Balikpapan, Kukar, PPU, Paser, Berau, Bulungan, dan Nunukan
  - Pengadaan N2 Cair untuk straw sapi sebanyak 100 Liter Balikpapan, Kaukar, PPU, Paser, Berau, Bulungan, dan Nunukan
  - Biogas sebanyak 35 Unit di kabupaten Balikpapan, Kukar, PPU, Paser, Berau, Bulungan, dan Nunukan

#### UPTD LABORATORIUM KESWAN

- a. Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
- Pengadaan Sarana Penunjang Operasional Laboratorium sebanyak 1 Paket di Kota Samarinda

- Pengadaan Peralatan Laboratorium kesmavet sebanyak 1 Paket di Kota Samarinda

#### UPTD BALAI PEMBIBITAN DAN INSEMINASI BUATAN

- a. Pembibitan dan Perawatan Ternak
  - Pembangunan Pabrik Pakan Mini sebanyak 1 Paket di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara
  - Pembangunan Rumah Bokasi sebanyak 1 unit di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara
- Rehab Paddock sebanyak 1 Paket di Desa Api-api Kabupaten Penajam Paser Utara

### 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Pemasukan bibit ternak ke Kalimantan Timur untuk mencapai populasi dasar 300.000 ekor maka diperlukan minimal 20.000 ekor/tahun. Sedangkan realisasi pemasukan ternak bibit pada tahun 2011 melalui dana APBD Provinsi hanya 3.500 ekor, sehingga masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan terobosan dalam pengadaan bibit dengan melakukan peningkatan peran swasta dan masyarakat seperti melalui CSR Perusahaan Sawit, Pertambangan dan Kredit Perbankan maupun Kredit Program.
- b. Belum adanya regulasi yang mendukung keterlibatan swasta dalam pengadaan ternak bibit, sehingga dapat membantu peningkatan populasi melalui pola integrasi sapi sawit dan reklamasi lahan eks tambang.
- c. Kebutuhan tenaga/aparat peternakan dalam daerah Kabupaten/Kota masih dirasakan belum terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara Kebijakan Pemerintah tentang “Moratorium Penerimaan CPNS” masih belum berakhir.
- d. Upaya terobosan untuk meningkatkan populasi ternak dan upaya mencapai kecukupan/swasembada daging (sapi) 2014 belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah seperti pengadaan bibit ternak dan operasional pendukung lainnya.
- e. Masalah yang berkaitan dengan produktifitas antara lain :
  - Tingkat kelahiran masih rendah yaitu sekitar 18,7 persen
  - Adanya kecenderungan memoTong sapi pada berat antara 250 - 300 Kg yang sebenarnya masih bisa digemukkan hingga berat mencapai 400 - 600 Kg.
  - IB belum bisa berjalan dengan baik akibat dari beberapa hal seperti satuan lokasi SPIB masih sangat luas dari jangkauan

petugas, kemampuan petugas sebagian masih rendah serta kesadaran petani juga masih rendah.

- f. Masalah yang berkaitan dengan Pembibitan Ternak :
  - Sulitnya mencari sumber bibit karena adanya beberapa propinsi yang telah menghentikan pengeluaran bibit.
  - Bibit yang tersedia pada daerah sumber bibit kurang memenuhi kriteria bibit.
  - Banyaknya kasus kejadian penyakit yang menyebabkan kematian pada bibit ternak yang masuk.
- g. Tingkat kepedulian mengenai kesehatan hewan/ternak masih rendah, sehingga penularan terhadap ternak lain banyak terjadi, oleh karena itu perlu mendapat perhatian lebih serius. Seperti kasus zoonosis penyakit Avian Influenza (AI), Anthrax bisa menular ke manusia dan hal ini sudah terjadi pada Provinsi/daerah lain. Di samping itu Penyakit Jembrana sudah banyak terjadi di seluruh Kabupaten/Kota yang menyebabkan kematian.
- h. Terbatasnya sarana transportasi bagi pelaksana di lapangan dengan jangkauan wilayah binaannya yang cukup luas serta tingkat kesulitan geografis di Provinsi Kalimantan Timur menyebabkan pelayanan kesehatan hewan terhadap masyarakat kurang cepat.
- i. Arus lalu lintas ternak antar Provinsi maupun antar perbatasan yang masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur tanpa dapat terkontrol menyebabkan penyebaran penyakit mudah terjadi.
- j. Kredit yang diharapkan peternak sebagai sumber permodalan untuk pengembangan usaha peternakan masih perlu jaminan dari peternak, saat ini baru Bank Kaltim yang telah merealisasikan Kredit Ternak Sejahtera, bahkan KUPS yang sudah lama disetujui hingga saat ini belum terealisasi.
- k. Laporan perkembangan ternak pemerintah tidak dibuat secara teratur. Banyak hal yang mempengaruhi keadaan ini diantaranya, lokasi penyebaran yang jauh dengan jumlah petugas yang terbatas, peran kelompok tani kurang aktif, sarana dan prasarana serta kurangnya dana pendukung bagi petugas di lapangan untuk memantau dan membuat laporan perkembangan ternak.
- l. Aparat penyuluhan di lapangan sebagian besar memiliki fungsi rangkap yaitu selain penyuluh juga memberikan pelayanan dan penyelesaian administrasi. Di samping itu sarana pendukung masih sangat terbatas serta koordinasi dengan instansi induk penyuluh yaitu BKPP masih kurang.

Solusi :

- a. Setiap tahunnya telah diupayakan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, pelatihan penjenjangan dan pelatihan teknis peternakan. Sedangkan penambahan pegawai masih belum dapat dilakukan sampai saat ini, karena adanya kebijakan moratorium CPNS.
- b. Untuk mengatasi penurunan populasi ternak antara lain melalui penyebaran/pengadaan ternak bibit yang bermutu, pengembangan usaha penggemukan, pengawasan pemotongan hewan betina produktif dan penerapan skala usaha yang ekonomis.
- c. Perlu adanya dukungan pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam upaya mencapai kecukupan/swasembada daging 2014, terutama dalam hal pengadaan bibit ternak dan pendukung lainnya.
- d. Untuk meningkatkan produktifitas antara lain melalui peningkatan kelahiran melalui program IB, seleksi pejantan pada lokasi-lokasi dengan sistem mini ranch, menekan tingkat kematian ternak dan perbaikan pengelolaan pakan ternak.
- e. Untuk menangani masalah perbibitan diharapkan, daerah dapat melakukan impor ternak bibit /sapi bunting.
- f. Melakukan pembinaan tentang cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar pada peternak serta sosialisasi secara berkesinambungan cara pencegahan terhadap penularan Penyakit ke manusia.
- g. Mengupayakan para peternak yang akan mengusahakan kembali usahanya melalui lembaga keuangan lain (modal ventura, BPD dan lain-lain) dengan dukungan proposal yang dapat meyakinkan pihak penyandang dana. Selain itu tetap diupayakan agar perusahaan yang membuka kemitraan tetap dapat menampung para peternak yang berminat disesuaikan dengan kemampuan daya serap pasar, baik lokal maupun regional.
- h. Diperlukan jadwal yang ketat dalam memberikan penyuluhan, pelayanan dan penyelesaian administrasi, sehingga tidak melupakan tugas dan fungsinya. Disamping itu diperlukan pula penambahan tenaga fungsional seperti tenaga paramedik serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- i. Mendukung sepenuhnya dalam upaya pengembangan “food estate” di Kaltim.



**III. Urusan Pilihan Kehutanan**  
**Dinas Kehutanan dan UPTD, dengan :**

**1. Program dan Kegiatan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Mei 2010, maka terjadi perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Kehutanan, khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Peredaran Hasil Hutan (UPTD PHH) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengeloaan Hutan (UPTD KPH). Kedua UPTD tersebut digabung dan dibentuk sesuai dengan lokasi UPTD menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (UPTD PPHH), sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak mengalami perubahan adalah UPTD Planologi, UPTD Pembinaan dan Pelestarian Alam dan UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

- a. Program Pelayanan Adminsitasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disipilin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
- f. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- g. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- h. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- j. Program Penataan dan Pemantapan Kawasan Hutan
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Untuk melaksanakan program pembangunan kehutanan, Alokasi Anggaran Sumber Dana APBD untuk Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 85.642.185.000,-. Realisasi anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 64.920.308.178,- atau sebesar 75,80 persen.

**a. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan :**

- Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
- Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan.

- b. Program rehabilitasi hutan dan lahan :**
  - Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan.
- c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan :**
  - Pencegahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  - Pembinaan dan peningkatan usaha pelstarian alam.
- d. Perlindungan dan pengamanan hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan :**
  - Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan.
- e. Program perencanaan dan pengembangan hutan :**
  - Pengembangan perencanaan pembangunan kehutanan tingkat Provinsi.
- f. Program penataan dan pemantapan kawasan hutan :**
  - Inventarisasi hutan.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

Berdasarkan Tabel 15 tersebut diatas, terdapat 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang belum memiliki Gedung Kantor yaitu UPTD PPHH Wilayah Tengah dan UPTD Wilayah Timur. Permasalahan kedua UPTD tersebut diatas belum memiliki Gedung Kantor dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. UPTD PPHH Wilayah Tengah**

UPTD PPHH Wilayah Tengah sebelumnya adalah UPTD Peredaran Hasil Hutan Samarinda (d/h Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ilir). Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Ilir memiliki Gedung Kantor di Jl. Slamet Riadi, Karang Asam Samarinda, pada saat akan dibangun Islamic Centre oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gedung Kantor CDK Mahakam Ilir termasuk lokasi yang akan dibangun. Untuk menggantikan Gedung Kantor CDK Mahakam Ilir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memindahkan CDK Mahakam Ilir ke lokasi Kantor Eks Gedung Kantor Wilayah Departemen Penerangan Jl. Basuki Rahmad Samarinda, sampai terbentuknya UPTD PPHH Wilayah Tengah. Selanjutnya Gedung Eks Kantor Wilayah Departemen Penerangan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan dipergunakan untuk Kantor BPID, sejak dibentuknya BPID, UPTD PPHH Wilayah Tengah berkantor bersama dan pada akhir Desember 2010 UPTD PPHH Wilayah Tengah diperintahkan untuk meninggalkan

- Kantor tersebut dan pindah di lokasi Gedung milik Pemprov dengan Status Pinjam Pakai di Jl. Biola Samarinda
- b. UPTD P PPH Wilayah Timur
- Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2009, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan UPTD PPH Wilayah Timur dengan wilayah kerja meliputi Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur harus dijalankan sebagaimana mestinya. Karena UPTD PPH merupakan UPTD baru maka sarana dan prasarana yang dimiliki belum ada mulai dari Gedung Kantor, Kendaraan Operasional sampai dengan Peralatan Perlengkapan Kantor, sementara ini UPTD PPH masih berkantor di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan mulai Tahun 2011 telah dialokasikan untuk sewa gedung Kantor.
- c. Terhadap kekurangan sarana dan prasarana akan diusulkan pada Tahun 2012, diantaranya adalah :
- Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPH Wilayah Tengah di Jl. Teuku Umar atau Rehab Berat Kantor di Jl. Biola Samarinda.
  - Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPH Wilayah Timur di Bontang atau Sengata (Kutai Timur)
  - Terhadap kekurangan sarana dan prasana penunjang dan operasional akan diusulkan pengadaannya secara bertahap kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

#### **IV. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi, dengan :**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Untuk mendukung Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana guna mencapai sasaran-sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam RENSTRA DINAS 2009-2013 yang disusun dengan mengacu pada RPJMD KALTIM 2009-2013, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur memiliki program 11 program dan 34 kegiatan.

##### **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2011 pencapaian program dan kegiatan dinas pertambangan dan energi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2011 dialokasikan dana sebesar Rp.

34.197.228.020,- dengan realisasi anggaran dinas pertambangan dan energi pada tahun 2011 ini yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 29.157.973.028 dengan tingkat pencapaian kinerja fisik 100 persen dan realisasi keuangan 85,26 persen.

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Kegiatan jasa surat menyurat
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan rapat koordinasi dan konsultan kedalam dan luar daerah
- Kegiatan Penyediaan jasa tenaga tertentu

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

- Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

**c. Program Peningkatan Disiplin**

- Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

**d. Program peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur**

- Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

**e. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**

- Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Kegiatan pengawasan pertambangan umum
- Kegiatan pengembangan sektor pertambangan umum
- Kegiatan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral di Kaltim

- Kegiatan optimalisasi penyebaran informasi kebijakan peraturan di sector PE
- Kegiatan evaluasi good mining practice pada perusahaan tambang di Kaltim
- Kegiatan pembinaan dan pengawasan sector hulu migas dan perusahaan jasa penunjang dinas
- Kegiatan pembinaan dan pengawasan sector hilir migas

**f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan**

- Kegiatan penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi
- Kegiatan inventarisasi dan evaluasi dampak kerusakan geologi tata lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat

**g. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**

- Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan perencanaan ketenagalistrikan
- Kegiatan konservasi energy

**h. Program Diversifikasi Bahan Bakar**

- Kegiatan pengembangan energi

**i. Program Perencanaan Anggaran, Informasi dan Evaluasi**

- Kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD

**j. Program Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Air Bawah Tanah dan Lingkungan Geologi**

- Kegiatan pembinaan dan pengelolaan ABT/AP
- Kegiatan pemetaan cekungan air tanah

**k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

**3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan :

Adapun permasalahan Dengan ditetapkannya Program dan Kegiatan tersebut diatas terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan pelaksanaan program

dan kegiatan kurang dapat berjalan, adapun permasalahan tersebut adalah :

- a. Masih banyaknya perusahaan baik yang eksploitasi maupun eksplorasi yang tidak secara rutin mengirim laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- b. Masih terdapat perusahaan jasa penunjang di bidang pertambangan umum yang belum mempunyai ijin.
- c. Perizinan mengenai Pertambangan Umum yang diterbitkan Dinas Pertambangan Kabupaten / Kota masih banyak yang belum ditembuskan ke Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur.
- d. Masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan pembayaran Royalti dan Leadrent.
- e. Banyaknya masyarakat sekitar wilayah pertambangan yang menuntut pelepasan lahan.
- f. Sulitnya mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Usaha Minyak & Gas Bumi & kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak dari pihak pelaku usaha hilir minyak dan gas.
- g. Tidak tersedianya dana operasional pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan dari Dana Bagi Hasil SDA Migas, untuk pengolahan Migas pada APBD masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- h. Belum diberikannya kewenangan didalam pengelolaan bahan bakar minyak kepada daerah sehingga tidak dapat menjamin pendistribusian BBM dan Gas dengan baik di daerah-daerah.
- i. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Minyak Tanah hanya diperuntukkan kepada konsumen Rumah Tangga dan Usaha Kecil, sedangkan untuk sektor Perikanan menggunakan bahan bakar minyak solar.

Solusi :

- a. Perlu efektif waktu pelaksanaan anggaran, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal.
- b. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan K3LL, distribusi BBM, penyalur pelumas bekas dapat berjalan sesuai rencana.
- c. Perlunya penambahan aparat pengawas dan pelatihan teknis yang lebih banyak bagi aparat pengawas agar perkembangan pengetahuan kegiatan migas terkini selalu dapat diikuti.